INKLUSI KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR DAN FAKTOR PENENTUNYA

SKRIPSI

Disusun Oleh :

ONFASTAR NATURA

145020401111011

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Meraih Drajat Sarjana Ekonomi

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

Inklusi Keuangan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dan Faktor Penentunya

Yang disusun oleh :

Nama	: Onfastar Natura
NIM	: 145020401111011
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan	: S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	: Ekonomi Keuangan Perbankan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehesif.

Malang, 12 Juli 2018
Mengetahui,

Ketua Program Studi	
Ekonomi Keuangan dan Perbankan,	**Dosen Pembimbing,**
Setyo Tri Wahyudi, SE., MEc., Ph.D.	**Marlina Ekawaty ,SE.,MSi., Ph.D.**
NIP. 196311161990021001	**NIP.196503111989032001**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"INKLUSI KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TIMUR DAN FAKTOR PENENTUNYA"

Yang disusun oleh :

Nama	: Onfastar Natura
NIM	: 145020401111011
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan	: S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	: Ekonomi Keuangan dan Perbankan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 18 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Marlina Ekawaty, SE., M.Si., Ph.D.
   NIP.196503111989032001
   (Dosen Pembimbing) .....
2. Setyo Tri Wahyudi , SE., MEc., Ph.D.
   NIP.198107022005011002
   (Dosen Penguji I) .....
3. Yenny Kornitasari, SE., ME.
   NIP.2015078810012001
   (Dosen Penguji II) .....

Malang, 18 Juli 2018
Ketua Program Studi
Ekonomi Keuangan dan Perbankan,

Setyo Tri Wahyudi , SE., MEc., Ph.D.
NIP.198107022005011002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	:	**Onfastar Natura**
Tempat, tanggal lahir	:	**Ujung Gading, 21 Februari 1996**
NIM	:	**145020401111011**
Jurusan	:	**S1-Ilmu Ekonomi**
Konsentrasi	:	**Ekonomi Keuangan dan Perbankan**
Alamat	:	**Jalan Ikan Tombro, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

INKLUS KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TIMUR DAN FAKTOR PENENTUNYA

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juli 2018

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
02460AFF120698054
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Marlina Ekawaty ,SE.,MSi., Ph.D.
NIP.196503111989032001

Onfastar Natura
NIM.145020401111011

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Keuangan dan Perbankan,

Setyo Tri Wahyudi , SE., MEc., Ph.D.
NIP.198107022005011002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Onfastar Natura

Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Gading, 21 Februari 1996

Alamat : Jl. Irian, Ujung Gading, Lembah Melintang, Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Jl. Ikan Tombro, Mojolangu, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Telepon/ HP : 081357965577

Email : onfastar.natura@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK AL MUTTAQIN IRIAN Tahun 2000 – 2002
2. SD : SDN 14 LEMBAH MELINTANG Tahun 2002 – 2008
3. SMP : SMPN 1 LEMBAH MELINTANG Tahun 2008 – 2011
4. SMA : SMAN 1 LUBUK SIKAPING Tahun 2011 – 2014
5. Perguruan Tinggi : S-1 Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Tahun 2014 – 2018.

Pengalaman Organisasi

1. Staf Magang Departemen Informasi dan Komunikasi (INFOKOM), Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS), Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HMJIE), Tahun 2014.
2. Staf Aktif Departemen Informasi dan Komunikasi (INFOKOM), Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS), Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HMJIE), Tahun 2015.
3. Staf Aktif Departemen Hubungan Masyarakat, Divisi Perlengkapan, Brawijaya Economic Choir (BEC), Tahun 2015.

Pengalaman Kerja

1. Magang di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon (9 Oktober s/d 20 Oktober 2017).

INKLUSI KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TIMUR DAN FAKTOR PENENTUNYA

Onfastar Natura

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: onfastar.natura@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan kabupaten/ kota di Jawa Timur serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di Jawa Timur. Tingkat inklusi keuangan diukur menggunakan indeks inklusi keuangan. Jenis penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 31 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis indeks inklusi keuangan dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan kota dan kabupaten di Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2016. Wilayah perkotaan memiliki inklusi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa PDRB perkapita, indeks pembangunan manusia, dan jumlah pengguna telepon seluler memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan kota dan kabupaten di Jawa Timur.

Kata kunci : Indeks Inklusi Keuangan, PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Pengguna Telepon Selular.

FINANCIAL INCLUSION OF REGENCIES/MUNICIPALITIES IN EAST JAVA AND ITS DETERMINANT FACTORS

Onfastar Natura

Faculty of Economics and Business, Brawijaya University

Email: onfastar.natura@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the level of financial inclusion of districts / cities in East Java and to analyze the factors that affect the level of financial inclusion in East Java. The level of financial inclusion is measured using a financial inclusion index. This research type is secondary data with quantitative approach. This study uses 31 regencies and cities in East Java. The analysis method used is financial inclusion index analysis and panel data regression analysis. The results show that city and district financial inclusion index in East Java has increased from 2014 to 2016. Urban areas have higher financial inclusion compared to districts. The results also show that per capita GRDP, human development index, and number of mobile phone users have a positive influence on the financial inclusion of cities and districts in East Java

Keywords : Financial Inclusion Index, Per Capita Gross Regional Domestic Product, Human Development Index, Cellular Phone User.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Inklusi Keuangan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dan Faktor Penentunya"**. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penyusunan skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materiil maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kehendak-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
2. Kedua Orang Tua penulis yaitu Ayah Sudirman Hadi (Bebel) dan Umak Rita Nauli, yang tiada henti selalu memberikan segalanya yang terbaik kepada anak-anaknya dengan mengiringi do'a, materi, dukungan semangat dan motivasi tiada henti. Tak lupa ketiga adik perempuan penulis Berlinta Gira, Miftahul Magfiroh, dan Latifa Qatra Safia yang selalu mendoakan dan memberi semangat. Dan juga keluarga besar yang memberikan do'a dan motivasinya.
3. Ibu Marlina Ekawaty, SE., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya, memberikan bekal ilmu-ilmu yang tak terhingga serta dengan sabar membimbing penulis hingga akhir pengerjaan skripsi.

4. Segenap Keluarga Besar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya :

   Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME., selaku Ketua Jurusan dan Ibu Dr. Nurul Badriyah, SE., ME., selaku Sekertaris Jurusan.

   Tim Penguji Skripsi yaitu Bapak Setyo Tri Wahyudi, SE., Mec., Ph.D., selaku Dosen Penguji I dan Ibu Yenni Kornitasari, SE., ME selaku Dosen Peguji II.

   Serta para staf-staf jurusan lainnya yang telah membantu meyelesaikan proses pengerjaan skripsi hingga akhir.
5. Kedua sahabat terbaikku Welfrid Sihite S.E selaku dosen pembimbing II saya yang sangat baik hati dan sabar mengajarkan ilmu-ilmunya serta membantu menyelesaikan skripsi hingga akhir dan Novita Tri Hartinah S.E selaku ketua Administrasi saya yang sangat baik hati membantu dalam proses pengurusan syarat-syarat sempro, kompre, yudisium, serta wisuda.
6. Sahabat ROAD TO S.E ku yang paling kompak, ngakak, dan tersayang dari awal maba sampe mala Welfrid Jenius, Denok Burnok, Whendi Tamvan, Kak Ros (Mufli Lambe), Tami Imut, Yolla Aremanita, Nurul Syantik, Icabe, Nesi Boneng, Windi Jamilah, Bintang Cilay, Ina Inana, Lutfi Nganjuk, dan Andriani Apel Batu.
7. Teman-teman batakku tercinta Welfrid Sihite, Michael Risdo Saragih, Ika Fransiska Tarigan, Nency Audika Butarbutar, Ruth Marpaung, dan Greace Ester Sibarani.
8. Anak- anak Keuangan Perbankan Angkatan 2014, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HMJIE), dan Brawijaya Economic Choir (BEC).
9. Rantau Pasaman, terkhusus buat teman satu-satunya SMANSA LUXICA angkatan 2014 yang kuliah di UB Arief Jeneirul Pratama (Bro Juned).

10. Uda Uni PMP, anak-anak hits Ujung Gading alumni SMANSA LUXICA Maya Yulita, Reskita Fajriani, Rangga Bastrian, Zahra Yaya, dan Magda Della.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 18 Juli 2018

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS ..... **iv**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Rumusan Masalah 9
- 1.3 Tujuan Penelitian 9
- 1.4 Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
- 2.1 Inklusi Keuangan 10
  - 2.1.1 Konsep Inklusi Keuangan 10
  - 2.1.2 Visi danTujuan Inklusi Keuangan 13
  - 2.1.3 Kelompok Sasaran Inklusi Keuangan 14
  - 2.1.4 Kerangka Nasional Inklusi Keuangan 17
  - 2.1.5 Indikator Keuangan Inklusi 20
- 2.2 Produk Domestik Regional Bruto 22
  - 2.2.1 Teori Produk Domestik Regional Bruto 22
  - 2.2.2 Manfaat Produk Domestik Regional Bruto 24
  - 2.2.3 Menghitung Produk Domestik Regional Bruto 25
- 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 27
  - 2.3.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia 27
  - 2.3.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia 31
  - 2.3.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia 32
- 2.4 Jumlah Pengguna Telepon Seluler 33
- 2.5 Faktor yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan 36
- 2.6 PenelitianTerdahulu 38
- 2.7 KerangkaPikir 41
- 2.8 Hipotesis 42

BAB III METODELOGI PENELITIAN **43**
- 3.1 Pendekatan Penelitian 43
- 3.2 Jenis dan Sumber Data 43
- 3.3 Populasi dan Sampel 44
- 3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 44
  - 3.4.1 Variabel Dependen 45

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3.4.2 Variabel Independen 45
3.4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia 45
3.4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto 46
3.4.2.3 Jumlah Pengguna Telepon Selular dan Internet 46
3.5 Metode Analisis Data 46
3.5.1 Analisis Perhitungan Inklusi Keuangan 46
3.5.2 Analisis Permodelan Data Panel 50
3.5.2.1 Metode Common Effect 51
3.5.2.2 Fixed Effect 52
3.5.2.3 Random Effect 52
3.5.3 Uji Spesifikasi Model 52
3.5.3.1 Uji Chow 52
3.5.3.2 Uji Hausman 53
3.5.4 Uji Asumsi Klasik 54
3.5.4.1 Uji Multikolinearitas 55
3.5.4.2 Uji Heterokedastisitas 55
3.5.4.3 Uji Autokorelasi 56
3.5.4.4Uji Normalitas 56
3.5.5 Pengujian Hipotesis 57
3.5.5.1 Uji Statistik t 57
3.5.5.2 Uji Statistik F 58
3.5.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2) dan Adjusted R^2 58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 60
4.1 Gambaran Umum Kotan dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur 60
4.1.1 Kota Batu 61
4.1.2 Kota Surabaya 61
4.1.3 Kota Mojokerto 62
4.1.4 Kota Malang 62
4.1.5 Kota Pasuruan 63
4.1.6 Kota Probolinggo 63
4.1.7 Kota Blitar 63
4.1.8 Kota Kediri 64
4.1.9 Kota Madiun 64
4.1.10 Kabupaten Gresik 64
4.1.11 Kabupaten Sidoarjo 65
4.1.12 Kabupaten Mojokerto 65
4.1.13 Kabupaten Jombang 65
4.1.14 Kabupaten Sumenep 66
4.1.15 Kabupaten Bangkalan 66
4.1.16 Kabupaten Banyuwangi 66
4.1.17 Kabupaten Jember 67
4.1.18 Kabupaten Malang 67
4.1.19 Kabupaten Pasuruan 68
4.1.20 Kabupaten Lumajang 68
4.1.21 Kabupaten Kediri 68
4.1.22 Kabupaten Nganjuk 69
4.1.23 Kabupaten Tulungagung 69
4.1.24 Kabupaten Blitar 69
4.1.25 Kabupaten Madiun 69

4.1.26 Kabupaten Ngawi 70
4.1.27 Kabupaten Magetan 70
4.1.28 Kabupaten Ponorogo 70
4.1.29 Kabupaten Bojonegoro 71
4.1.30 Kabupaten Tuban 71
4.1.31 Kabupaten Lamongan 71
4.2 Analisis Indeks Inklusi Keuangan 72
4.2.1 Indikator Penetrasi Perbankan 72
4.2.2 Indikator Aksesibilitas Jasa Keuangan (Perbankan) 75
4.2.3 Indikator Usage (Penggunaan) Rekening 79
4.2.4 Hasil Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan Kota dan Kabupaten Propinsi Jawa Timur 82
4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan 89
4.3.1 Hasil Uji Regresi Data Panel 81
4.3.2 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Inklusi Keuangan 97
4.4 Implikasi Penelitian 102

BAB V PENUTUP 105
5.1 Kesimpulan 105
5.2 Saran 106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Karakteristik Kelompok Sasaran Keuangan Inklusi	17
Tabel 3.1.	Data, Satuan, dan Sumber Data	44
Tabel 3.2	Indikator yang digunakan untuk menghitung IIK	48
Tabel 4.1	Jumlah Rekening Deposit Per 1.000 Populasi Dewasa	72
Tabel 4.2	Jumlah Kantor Bank Per 100.000 Populasi Dewasa	76
Tabel 4.3	Jumlah DPK dan Kredit terhadap PDRB (%)	79
Tabel 4.4	Sebaran Setiap Indikator	82
Tabel 4.5	Nilai Indeks Inklusi Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2016	83
Tabel 4.6	Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Nilai Rata-Rata Indeks Inklusi Keuangan Periode 2014-2016	87
Tabel 4.7	Hasil Uji Chow	90
Tabel 4.8	Hasil Uji Hausman	90
Tabel 4.9	Hasil Estimasi Fixed Effect Model	91
Tabel 4.10	Hasil Uji t-statistik	94
Tabel 4.11	Hasil Uji F-statistik	95
Tabel 4.12	Hasil Uji Normalitas	96
Tabel 4.13	Hasil Uji Multikolinearitas	96
Tabel 4.14	Hasil Uji Heterokedastisitas	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kantor Bank di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2016 5

Gambar 1.2 Perkembangan jumlah DPK dan Kredit yang Disalurkan Bank Umum di Jawa Timur Tahun 2011-2016 6

Gambar 1.3 Perkembangan Rasio Kredit per PDRB, Rasio DPK per PDRB dan Koefisien Gini di Jawa Timur tahun 2011-2016 7

Gambar 3.1 Grafik Tiga Dimensi Indeks Inklusi Keuangan 49

Gambar 4.1 Persentase Pengguna Telepon Seluler, SMS Banking dan Inklusi Keuangan di Jawa Timur Periode 2012-2016 99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Bahkan menurut Bank Dunia, Indonesia ialah negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dari keberhasilan Indonesia menjadi negara dengan pendapatan perkapita yang terus meningkat setiap tahun dari $1.148 pada tahun 2004 menjadi $3.570 pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir juga berfluktuasi. Pada tahun 2012 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6.19 %, tahun 2013 sampai 2015 mengalami perlambatan secara berturut-turut sebesar 5.56%, 5.02%, 4.79% dan pada tahun 2016 kembali mengalami penguatan ekonomi yaitu sebesar 5,02 %. Perlambatan ekonomi tersebut disebabkan oleh banyak faktor baik yang berasal dari dalam negeri maupun goncangan dari luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat tersebut menunjukkan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi. Namun pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat belum mencapai pertumbuhan yang berkualitas. Masih banyak masyarakat Indonesia khususnya masyarakat menengah ke bawah yang belum dapat merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN (2014:1), pertumbuhan ekonomi berkualitas dapat dilihat dari tingkat pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Menurut Macroeconomic Dashboard (2017) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi justru diikuti dengan meningkatnya kondisi pengangguran dan kemiskinan.

Kondisi masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai jasa keuangan formal. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad dalam Wibowo (2014) menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai berarti masyarakat tersebut telah memiliki kemampuan dalam mengelola keuangannya dengan baik. Disamping itu, kendala masyarakat miskin juga dikarenakan pendapatan yang rendah yang hanya mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dan menyebabkan mereka tidak memiliki tabungan. Hal ini akan berdampak pada kurangnya akses masyarakat pada instrument keuangan.

Menurut Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Soetiono dalam Dewi (2014) tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di Singapura tingkat literasi sudah mencapai 98 %, di Malaysia tingkat literasi mencapai 66 % dan Thailand telah mencapai 73 %. Sementara Indonesia sendiri masih berada di angka 29 %.Salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia kurangnya antusias masyarakat terhadap produk layanan jasa perbankan. Hal tersebut dapat disebabkan beberapa hal salah satunya yaitu kondisi geografis Indonesia dimana hampir sekitar 60 % masyarakat Indonesia berada di pedesaan yang mengakibatkan sulitnya dalam menjangkau layanan jasa keuangan perbankan (Dewi, 2014). Ini mengindikasikan bahwa daerah yang terletak di pedesaan lebih sulit mengakses jasa keuangan formal seperti bank, sehingga banyak masyarakat masuk dalam kategori *unbanked people*. Sebagian besar dari masyarakat yang berada di pedesaan cenderung menyimpan uang dengan cara yang masih tergolong tradisional yaitu menyimpan uang didalam rumah tanpa

digunakan yang berakibat pada tidak produktifnya pengelolaan uang tersebut (Agus, 2014).

Dalam mengatasi keterbatasan akses layanan jasa keuangan di Indonesia maka muncul program perluasan akses layanan keuangan yang disebut dengan inklusi keuangan. Program ini berupaya untuk memperluas akses layanan jasa keuangan terhadap masyarakat secara luas dan menyeluruh dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Perbankan memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan kegiatan inklusi keuangan karena perbankan memiliki *market share* kegiatan keuangan sampai 80% (Bank Indonesia, 2014)

Inklusi keuangan merupakan penyediaan akses bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah dengan tujuan agar dapat memiliki dan menggunakan layanan sistem keuangan. Alat ukur untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan suatu wilayah ialah dengan merumuskan indeks inklusi keuangan yang dibagi menjadi 3 indikator yaitu 1) indikator penetrasi perbankan, 2) indikator aksesibilitas jasa keuangan (perbankan), dan 3) indikator *usage* (penggunaan) rekening di masyarakat (Sarma, 2012). Indikator penetrasi perbankan menjelaskan tentang sejauh mana masyarakat telah memiliki nomor rekening di perbankan. Hal ini dapat menunjukkan *financial awareness* (kesadaran keuangan) pada masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan. Indikator aksesibilitas jasa keuangan (perbankan) menunjukkan bahwa sejauh mana industri perbankan dapat menjangkau masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Ditunjukkan dengan jumlah outlet bank atau nomor ATM yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Apabila masyarakat semakin bisa mengakses perbankan maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan indikator *usage* (kegunaan) menjelaskan tentang sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap penggunaan produk-produk perbankan dalam aktivitas perekonomian. Hal ini menjelaskan perilaku masyarakat dalam

mengelola keuangan di dalam kehidupan sehari-hari melalui produk-produk perbankan tersebut.

Kemudahan dalam mengakses jasa keuangan atau inklusi keuangan pada suatu daerah dapat dipengaruhi oleh pembangunan di daerah tersebut. Semakin baik pembangunan di suatu daerah maka semakin mudah pula masyarakat dalam mengakses jasa keuangan perbankan yang mengindikasikan semakin tinggi indeks inklusi keuangan di daerah tersebut. Pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari variabel sosial ekonomi seperti PDRB, pengangguran, melek huruf, dll serta variabel infrastruktur seperti persentase penduduk pengguna telepon seluler dan internet, rasio panjang jalan, dan sebagainya (Sarma and Pais, 2011).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Bahkan, Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia. Jawa Timur memiliki luas wilayah mencapai 47.799,75 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 37.269.885 jiwa yang terbagi dalam 9 kota dan 29 kabupaten (Kemendagri, 2013). Dilihat dari topografinya, provinsi Jawa Timur dibedakan menjadi tiga dataran, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Dataran tinggi dengan ketinggian di atas 100 meter di atas permukaan laut, dataran sedang dengan ketinggian antara 45 - 100 meter di atas permukaan laut, dan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 45 meter di atas permukaan laut (BPS, 2016). Beberapa wilayah kota dan kabupatennya berada pada area pegunungan dan lautan. Hal ini membuktikan bahwa kondisi geografis kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda satu sama lain. Maka dari itu, kondisi geografis yang berbeda-beda pada kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur ini jelas akan mempengaruhi kondisi ketersediaan layanan jasa keuangan pada setiap wilayah.

Sektor perbankan di Jawa Timur mengalami perkembangan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor perbankan terhadap PDRB Jawa Timur yang setiap tahunnya terus meningkat. Kontribusi sektor perbankan terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2016 mencapai Rp37.158 milyar, sedangkan pada tahun 2011 hanya mencapai Rp24.088 Miliyar (BPS Jawa Timur, 2016). Perkembangan perbankan juga dapat dilihat dari jumlah infrastruktur fisik yang terus mengalami peningkatan. Salah satu infrastruktur fisik dari perbankan adalah jumlah kantor bank umum yang didirikan di daerah-daerah yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.

Gambar 1.1 Jumlah Kantor Bank di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2016

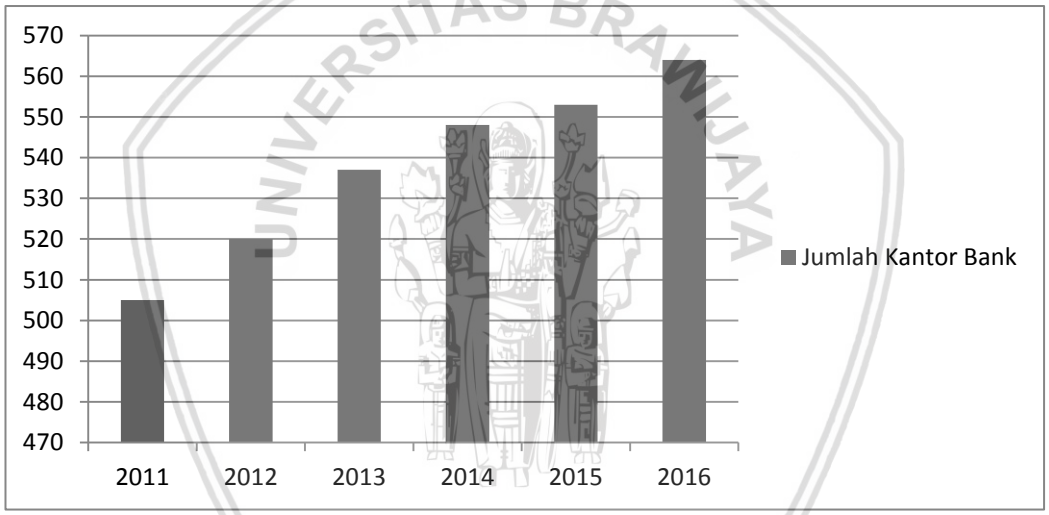

Sumber : OJK, 2017

Berdasarkan gambar 1.1, jumlah kantor bank yang beroperasi di Jawa Timur selalu mengalami penambahan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2011 jumlah bank sebanyak 505 unit, pada tahun 2012 meningkat menjadi 520 unit, tahun 2013 sebanyak 537 unit hingga pada tahun 2016 menjadi 564 unit. Peningkatan jumlah bank tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak kantor bank yang tersebar ke beberapa daerah yang ada di Jawa Timur. Hal ini berarti semakin banyak masyarakat jawa timur yang dapat mengakses jasa keuangan perbankan. Begitu pula dengan jumlah tabungan, yang dapat dilihat dari jumlah

Dana Pihak Ketiga (DPK), serta kredit yang disalurkan melalui perbankan juga mengalami peningkatan.

Gambar 1.2 Perkembangan jumlah DPK dan Kredit yang Disalurkan Bank Umum di Jawa Timur Tahun 2011-2016

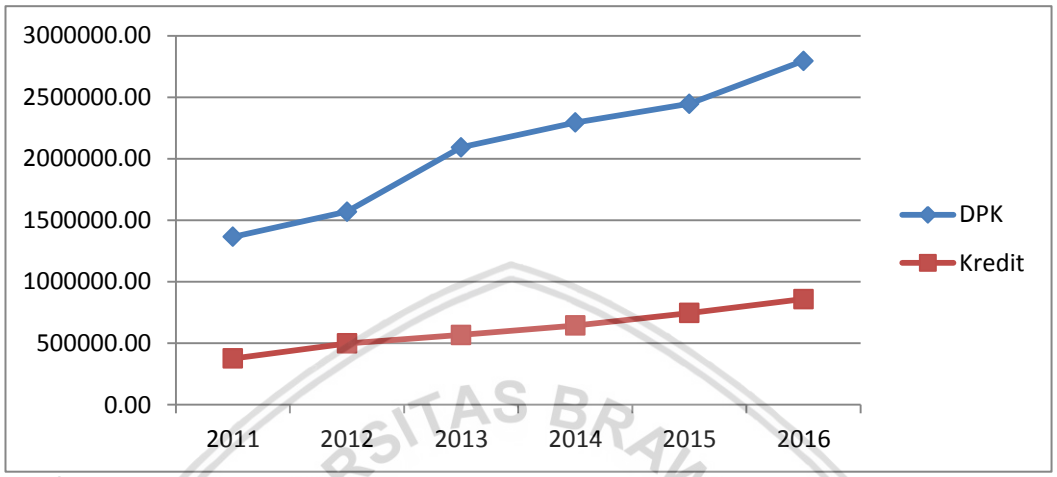

Sumber : OJK, 2017

Jumlah DPK yang dihimpun bank umum pada tahun 2011-2016 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah DPK yang dihimpun adalah sebesar 1.364.979 milyar rupiah, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 1.570.096 milyar rupiah, pada tahun 2013 menjadi 2.092.268 milyar rupiah hingga pada tahun 2016 menjadi 2.795.168 milyar rupiah. Begitu pula dengan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank umum selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 376.030 milyar rupiah hingga pada tahun 2016 mencapai 859.560milyar rupiah.

Seiring dengan berkembangnya sektor perbankan, distribusi layanan jasa perbankan juga harus merata. Masih terdapat masyarakat Jawa Timur yang belum dapat mengakses jasa perbankan meskipun indeks literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur berada diatas indeks nasional. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Kepala OJK Regional IV Jawa Timur, Sukamto menyebutkan tingkat literasi keuangan masyarakat Jawa Timur sebesar 35,6 persen, dengan tingkat inklusi sebesar 73,2 persen. Angka indeks Jawa Timur berada di atas

indeks nasional, dan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia adalah sebesar 29,7 persen dan tingkat inklusi sebesar 67,8 persen. Angka indeks tersebut menunjukkan bahwa, dari 39 juta orang penduduk Jawa Timur, hanya sekitar 11,5 juta orang setara dengan 35,6 persen yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan. Asumsinya dari 100 orang penduduk Jawa Timur, terdapat 35 orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan (Kompas, 2016).

Adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui akses jasa keuangan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Kemudahan dalam akses perbankan khususnya masyarakat menengah ke bawah dapat meningkatkan efisiensi alokasi modal yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ini secara tidak langsung dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Tetapi di Jawa Timur menunjukkan hal yang sebaliknya, perkembangan perbankan yang meningkat searah dengan ketimpangan pendapatan semakin besar. Hal ini dapat ditunjukkan melalui gambar berikut ini:

Gambar 1.3 Perkembangan Rasio Kredit per PDRB, Rasio DPK per PDRB dan Koefisien Gini di Jawa Timur tahun 2011-2016

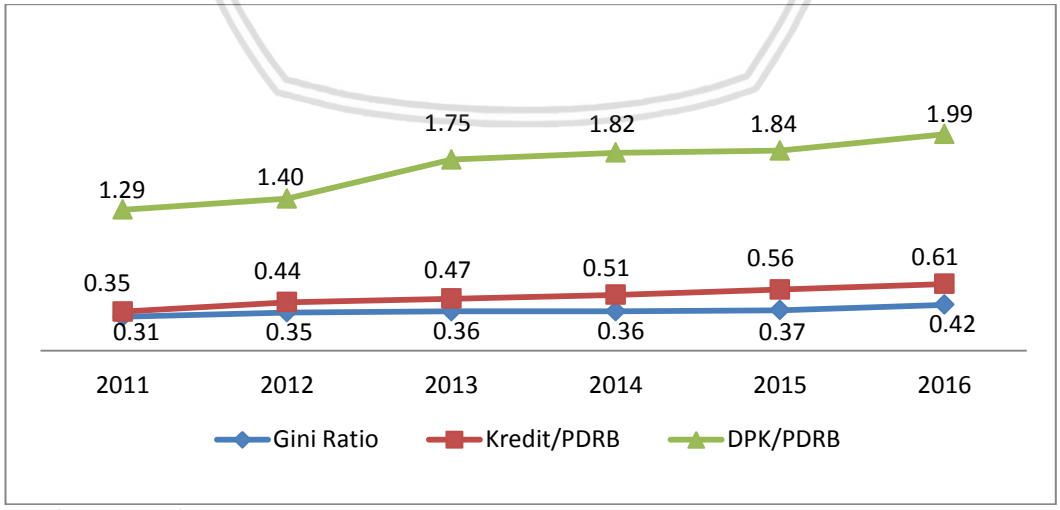

Sumber: OJK dan BPS, 2017

Berdasarkan gambar 1.3, proporsi jumlah DPK yang dihimpun bank umum terhadap PDRB dan proporsi kredit yang disalurkan bank umum terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti oleh semakin membaiknya pemerataan pendapatan. Kondisi ini dapat dilihat dari koefisien gini di Jawa Timur yang semakin besar, yaitu 0,31 pada tahun 2011 menjadi 0,42 pada tahun 2016 (BPS Jawa Timur, 2017).

Penelitian yang dilakukan Bintan Badriatul Ummah (2015) tentang inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia menyatakan bahwa hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan rendah. Inklusi keuangan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh variabel sosial ekonomi maupun variabel infrastruktrur. Jumlah pengguna telepon seluler dan internet mempengaruhi positif tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Marlina Fransiska Purba (2016) mengenai kondisi inklusi keuangan pada kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah serta pemerataan pendapatan di Jawah Tengah menyatakan bahwa secara keseluruhan indeks inklusi keuangan di kabupaten/kota Jawa Tengah termasuk dalam kategori indeks inklusi keuangan yang rendah. Indeks inklusi keuangan menunjukkan hubungan satu arah dengan indeks gini dimana indeks gini mempengaruhi indeks inklusi keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dalam penggunaan jasa perbankan yang dipengaruhi oleh faktor penentunya oleh karena itu perlu dianalisis lebih lanjut terkait tingkat inklusi keuangan di Jawa Timur. Disamping itu, penelitian mengenai inklusi keuangan masih jarang dilakukan sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Dengan adanya masalah di atas, maka peneliti memilih judul "**Inklusi Keuangan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dan Faktor Penentunya**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat inklusi keuangan kabupaten/kota di Jawa Timur ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat inklusi keuangan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Memberikan gambaran terkait inklusi keuangan antar kabupaten/kota di Jawa Timur
2. Memberikan gambaran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan
3. Sebagai bahan tinjauan dalam menentukkan kebijakan strategis terkait peningkatan akses dan penggunaan jasa keuangan serta faktor-faktor yang berpengaruh

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Inklusi Keuangan

Menurut Sarma (2012), inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. Definisi mengenai *financial exclusion* menekankan pada sulitnya akses terhadap jasa keuangan. Sehingga berbagai peneliti mendefinisikan *financial inclusion* sebagai kebalikan dari *financial exclusion*.

2.1.1 Konsep Keuangan Inklusi

Konsep keuangan inklusif muncul setelah adanya konsep keuangan eksklusif. Menurut Leyshon dan Thrift (1995), keuangan eksklusif adalah sebuah proses untuk mencegah kelompok sosial dan individu untuk memperoleh akses terhadap system keuangan formal. Berdasarkan European Commision (2008), *Financial exclusion* merupakan sebuah proses dimana orang menghadapi kesulitan dalam mengakses dan/atau menggunakan jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat di tempat mereka berada. Sedangkan National Australian Bank Report (2011) mendefinisikan *Financial exclusion* itu terjadi saat individu tidak dapat mengakses jasa keuangan dan produk yang tepat dan terjangkau – jasa utama dan produk adalah rekening untuk transaksi, asuransi, dan kredit jumlah sedang.

Menurut Sanjaya (2014), keuangan inklusif merupakan penyediaan akses bagi masyarakat termarginalkan (lebih kepada masyarakat miskin) dengan tujuan agar dapat memiliki dan menggunakan layanan sistem keuangan. Tidak jauh berbeda dengan Sanjaya, Gerdeva dan Rhyne (2011) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah kondisi dimana semua orang dapat mengakses jasa keuangan berkualitas, tersedia dengan harga terjangkau, dengan cara yang nyaman dan memuaskan.

Keuangan inklusif dan akses terhadap layanan jasa keuangan adalah dua permasalahan yang berbeda (Bank Dunia, 2014). Keuangan inklusif didefinisikan sebagai proporsi individu atau perusahaan yang menggunakan layanan jasa keuangan memiliki multidimensi, merefleksikan beragam macam layanan keuangan, mulai dari fasilitas pembayaran, rekening tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan pasar modal. Keuangan inklusif juga berbeda antara individu dan perusahaan. Sedangkan rendahnya penggunaan layanan jasa keuangan bukan berarti tidak terdapat akses terhadap layanan keuangan. Sebagian masyarakat mungkin saja memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan pada tingkatan harga terjangkau, namun memilih untuk tidak menggunakan layanan jasa tertentu. Sementara itu juga masih banyak masyarakat lainnya yang tidak memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti : biaya yang tinggi dan tidak terjangkau, tidak tersedia layanan jasa keuangan yang dibutuhkan, adanya keterbatasan regulasi dan hukum, serta ketidakpastian pasar dan hambatan budaya.

Keuangan inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya keuangan inklusif menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal dan sebaliknya. Rendahnya keuangan inklusif menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal. Peningkatan tingkat

keuangan inklusif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan jasa keuangan formal yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Keuangan inklusi memiliki beberapa manfaat baik bagi masyarakat, pemerintah maupun regulator makroprudensial (Purba, 2016). Adapun manfaat tersebut antara lain:

a. Bagi Masyarakat, seperti:
   - mempunyai sarana "*keeping*" dan "*saving*" uang yang aman dan terjamin
   - memperoleh peluang untuk masuk ke sistem ekonomi yang lebih luas dimulai dengan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang formal, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan
   - membuka peluang akses kepada pembiayaan, asuransi, dan layanan pembayaran (remitansi)
   - membantu perubahan perilaku pengelolaan keuangan
   - membantu pemupukan aset.

b. Bagi Pemerintah, seperti:
   - membantu penurunan tingkat kemiskinan dan pemupukan aset
   - membantu peningkatan aktivitas ekonomi lokal
   - efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.

c. Bagi regulator makroprudensial dan mikroprudensial, seperti:
   - membantu menurunkan resiko likuiditas dan risiko kredit
   - membantu penurunan resiko sistematik.

2.1.2 Visi dan Tujuan Inklusi Keuangan

Keuangan inklusif memiliki visi nasional yaitu mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Adapun yang menjadi tujuan keuangan inklusif dapat dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.
b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan

permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.

e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.

f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan resikonya.

2.1.3 Kelompok Sasaran Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan merupakan strategi dalam pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menyasar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Pengelompokan tersebut meliputi:

a. Miskin Berpendapatan Terendah.

   Kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan

sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

b. Miskin Bekerja.

Kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan perdesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan pendapatan.

c. Bukan Miskin.

Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja.

d. Pekerja Migran Domestik dan Internasional.

TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah perdesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses yang terbatas ke produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka selama proses tahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).

e. Perempuan.

Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka

terhadap jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda.

f. Penduduk daerah terpencil.

Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, mobile money untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar perdesaan dan perkotaan).

Tabel 2.1 Karakteristik Kelompok Sasaran Keuangan Inklusi

Kapasitas Keuangan	Sasaran		
	Miskin Berpendapatan Rendah	**Miskin Bekerja/Miskin Produktif**	**Hampir Miskin**
Kemampuan Menabung	Tidak memiliki kemampuan menabung sama sekali/memiliki kemampuan sangat kecil tanpa akses ke layanan tabungan	Memiliki kemampuan menabung sebagian dari pendapatan, tetapi kebanyakan menabung secara informal	Memiliki kemampuan menabung dan akses ke bank formal
Akses ke kredit	Tidak dapat melunasi	Memiliki akses ke kredit informal. Mampu melunasi kredit, tetapi tidak memiliki jaminan yang dapat menerima bank	Memiliki akses ke beberapa sumber formal dan informal. Mampu melunasi kredit dan memiliki barang jaminan
Kebutuhan Asuransi	Sangat rentan terhadap goncangan ekonomi pribadi dan masyarakat	Memilki beberapa penyangga, tetapi tetap bisa sangat berpengaruh terhadap guncangan	Memiliki beragam instrument untuk menghadapi resiko
Kebutuhan pengiriman uang	Menerima remitansi dari anggota keluarga yang menjadi pekerja migrant	Memerlukan remitansi serta kemungkinan pengiriman uang melalui ponsel	Mungkin perlu melakukan pengiriman melalui bank, membayar tagihan, dll
Melek Keuangan	Tidak Ada	Sedang	Sedang
Identitas Keuangan	Tidak Ada	Terbatas	Terbatas

Sumber : Booklet Keuangan Inklusif (2014)

2.1.4 Kerangka Nasional Inklusi Keuangan

Untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, dibutuhkan suatu strategi nasional yang disebut dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Kerangka kerja umum keuangan inklusif dibangun di atas enam pilar sebagai berikut:

a. Edukasi Keuangan

Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: 1) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, 2) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, 3) perlindungan nasabah, 4) keterampilan mengelola keuangan.

b. Fasilitas Keuangan Publik

Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: 1) subsidi dan bantuan sosial, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan UMKM.

c. Pemetaan Informasi Keuangan

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari *unbankable* menjadi *bankable* oleh institusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi: 1) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), 2) sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), 3) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, 4) identifikasi nasabah potensial

d. Kebijakan/Peraturan yang mendukung.

Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: 1) Kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 3) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional, 4) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, 5) memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, 6) menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.

e. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi.

Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensional di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: 1) fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan *unbanked*) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris, 2) peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, 3) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

f. Perlindungan Konsumen.

Bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi: 1) transparansi produk, 2) penanganan keluhan nasabah, 3) mediasi, 4) edukasi konsumen. Keenam pilar tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam program-program yang telah disesuaikan dengan kategori penduduk yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian terkait.

2.1.5 Indikator Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan konsep yang *multi-faceted* dan terdiri atas beberapa indikator, yang semuanya relevan dengan agenda pembangunan di suatu negara. Untuk mengukur keuangan inklusif dengan menghitung proporsi dari populasi dewasa atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap jasa keuangan formal diperlukan adanya Indeks Inklusi Keuangan (IIK). Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) yang dikembangkan oleh Sarma *et.al.*(2011) terbagi atas tiga dimensi yaitu:

a) Penetrasi Perbankan

Penetrasi perbankan adalah indikator utama dalam inklusif keuangan. Semakin banyak penggunanya maka semakin baik, karena itu sistem keuangan diharapkan dapat menjangkau secara luas di antara penggunanya. Salah satu indikator penetrasi perbankan adalah proporsi populasi yang memiliki rekening dibank.

b) Ketersediaan jasa keuangan.

Jasa keuangan harus tersedia bagi semua pengguna, dalam suatu sistem keuangan yang inklusif. Ukuran ketersediaan ini adalah jumlah *outlet* (kantor cabang, ATM, dan lain lain). Ketersediaan jasa dapat

dilihat dari jumlah cabang lembaga keuangan atau jumlah ATM (*Automatic Teller Machine*). Tidak bisa dipungkiri ATM memiliki peranan yang sangat penting bagi jasa perbankan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kemudahan dalam mengambil tunai, penyetoran tunai serta digunakan untuk pembayaran membuat ATM menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat. Dengan adanya kantor cabang dan ATM, masyarakat akan semakin mudah menjangkau jasa keuangan.

c) Penggunaan jasa perbankan

Banyak alasan mengapa sekelompok orang masih belum memanfaatkan keberadaan jasa keuangan meskipun mereka memiliki akses terhadap jasa keuangan. Di antaranya, jauhnya *outlet* bank dari tempat kediaman atau aktivitas sehari-hari, pengalaman buruk yang melibatkan penyedia jasa. Oleh sebab itu, memiliki rekening tidak cukup untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif, namun masyarakat juga bisa menggunakannya. Kegunaan tersebut di antaranya dapat dalam bentuk kredit, deposit, pembayaran, remitansi, dan transfer.

Pada dasarnya indikator yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan yang inklusif sebuah negara adalah ketersediaan dan akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

Bank Indonesia (2014) memandang bahwa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja.

Secara umum, kompleksitas keuangan inklusif ke dalam 4 (empat) indikator, sebagai berikut :

a. Ketersediaan (*Access*): kemampuan untuk menggunakan layanan jasa keuangan dan produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan formal.
b. Kualitas (*Quality*): sebagai ukuran atas kesesuaian jasa atau produk keuangan terhadap kebutuhan konsumen, komponen kualitas mencakup pengalaman konsumen yang ditunjukkan dalam opini dan sikap tentang produk-produk jasa keuangan yang tersedia bagi mereka.
c. Penggunaan (*Usage*): tidak hanya menekankan pada penggunaan layanan jasa keuangan, lebih memfokuskan pada aspek *permanence and depth* dari layanan dan produk sektor keuangan di suatu negara.
d. Kesejahteraan (*Welfare*): mengukur dampak dari suatu produk atau layanan jasa keuangan terhadap konsumen, seperti perubahan pada pola konsumsi, aktivitas usaha dan investasi, serta kesejahteraan.

2.2 Produk Domestik Regional Bruto

2.2.1 Teori Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi perekonomian di suatu negara dalam periode tertentu melalui data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga kostan maupun harga berlaku. Produk Domestik Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara tertentu. Produk domestik bruto (PDB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi lingkup yang lebih luas atau skala nasional sedangkan produk domestik regional bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi lingkup yang lebih kecil atau skala regional.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Besaran PDRB antar daerah berbeda-beda, ini dikarenakan potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki antar daerah bervariasi. Di dalam suatu perekonomian negara, antara sektor satu dengan sektor lainnya saling membutuhkan, baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Teori-teori terkait dengan PDRB (Boediono, 1999), antara lain:

a. Teori Klasik

   Ahli ekonomi klasik yakin dengan adanya perekonomian persaingan sempurna maka seluruh sumber ekonomi dapat digunakan dengan maksimal atau *full employment*. Para ahli ekonomi klasik menyatakan bahwa *full employment* itu hanya bisa dapat dicapai apabila perekonomian bebas dari campur tangan pemerintah dan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

   Semua kaum klasik memandang bahwa penumpukan modal sebagai kunci kemajuan. Karena itu mereka menekankan betapa pentingnya tabungan dalam jumlah besar, selain itu mereka juga berpendapat bahwa keuntungan merangsang investasi. Semakin besar keuntungan merangsang investasi, semakin besar keuntungan dan akan semakin besar pula akumulasi modal investasi.

b. Teori Ricardian.

   David Ricardo menyatakan pandangannya bahwa mengenai pembangunan ekonomi dalam bukunya *The Principles Of Political Ekonomy And Taxation*. David mengungkapkan bahwa faktor yang

penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah buruh, pemupukan modal, perdagangan luar negeri.

Seperti ahli ekonomi modern, teori Ricardo menekankan pentingnya tabungan untuk pembentukan modal. Dibanding pajak David Ricardo lebih menyetujui pemupukan modal melalui tabungan. Tabungan dapat diperoleh dengan penghematan pengeluaran, memproduksi lebih banyak,dan dengan meningkatkan tingkat keuntungan serta mengurangi harga barang.

c. Teori Harodd-Domar.

Model pertumbuhan Harodd-Domar di bangun berdasarkan pada pengalaman negara maju. Harodd-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi, mengenai watak ganda yang dimiliki oleh investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan kedua ia memperbesar kapasitas produksi pertanian dengan cara menaikkan stok modal. Karena itu selama investasi netto tetap berjalan, pendapatan nyata dan output akan senantiasa tambah besar.

2.2.2 Manfaat Produk Domestik Regional Bruto

Manfaat/kegunaan yang dapat diperoleh dari data PDRB sebagai bahan penyusunan perencanaan maupun sebagai bahan penilaian kinerja perekonomian (evaluasi pembangunan) suatu daerah, diantaranya :

a. Besaran PDRB

Digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Pertumbuhan Ekonomi.

Digunakan sebagai dasar analisis untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu (kenaikan produksi barang dan jasa).

c. Struktur Ekonomi.

Digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang dominan (*leading sector*) dalam perekonomian suatu daerah serta untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi suatu daerah.

d. Pendapatan per Kapita.

Digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum.

2.2.3 Menghitung Produk Domestik Regional Bruto

Untuk menghitung PDRB terdapat tiga metode yang dapat digunakan, antara lain:

a) Metode Produksi

Dengan adanya metode produksi produk domestik regional bruto dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

(2) Pertambangan dan Penggalian

(3) Industri Pengolahan

(4) Listrik, Gas dan Air Bersih

(5) Konstruksi

(6) Perdagangan, Hotel dan Restoran

(7) Pengangkutan dan Komunikasi

(8) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

(9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Secara sistematis, metode produksi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \sum_{i=1}^{n} P_i Q_i$$

Dimana:

Y = Produk domestik atau produk domestik regional bruto

P = Harga barang unit ke-1 hingga unit ke-n

Q = Jumlah barang jenis ke-1 hingga jenis ke-n

b) Metode Pendapatan.

Metode ini menjumlahkan semua pendapatan dari faktor – faktor produksi dalam perekonomian, yaitu manusia (tenaga kerja), modal, tanah dan *skill*. Bila tenaga kerja menghasilkan upah (*wage*s = W), modal menghasilkan bunga (*interest* = I), tanah menghasilkan sewa (*rent* = R), dan *skill* menghasilkan *entreprenuere* menghasilkan (*profit* = P). Hasil perhitungan dengan menggunakan metode pendapatan sering disebut dinamakan pendapatan nasional atau PN (*national income*).

Secara sistematis, persamaan metode pendapatan sebagai berikut:

Y = YW + YI + YR + YP

Dimana:

YW = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak

YI = Pendapatan dari bunga

YR = Pendapatan lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak

YP = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan

c) Metode Pengeluaran.

Metode ini mencoba menghitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen (C), rumah tangga swasta/perusahaan (I), rumah tangga pemerintah (G), dan luar negeri *Ekspor Netto* (X - M). PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

(1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba

(2) pengeluaran konsumsi pemerintah

(3) pembentukan modal tetap domestik bruto

(4) perubahan inventori, dan

(5) ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara sistematis, persamaannya sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X – M)$$

2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.3.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan ialah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk bisa menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nations Development Programme-UNDP).* Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices).*

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk kategori maju, berkembang, atau terbelakang. Selain itu, juga menjadi parameter untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi suatu negara terhadap kualitas rakyatnya. Dan tidak hanya digunakan sebagai tolok ukur pengelompokkan suatu

negara namun juga dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur dan mengelompokkan sub-negara (daerah/bagian).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran ringkas rata-rata pencapaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup yang layak (BPS). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pada awalnya IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Untuk melihat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

a) IPM <60 : IPM rendah.

b) 60 ≤ IPM <70 : IPM sedang.

c) 70 ≤ IPM <80 : IPM tinggi.

d) IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi.

Nilai IPM menunjukkan seberapa jauh wilayah telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat, dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.

Terdapat beberapa premis penting dalam meningkatkan pembangunan manusia antara lain:

a) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Maksudnya bahwa pembangunan lebih kepada untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka saja. Sehingga konsep pembangunan manusia secara keseluruhan berpusat pada penduduk dan bukan hanya dari aspek ekonomi saja.

b) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan manusia namun juga dalam upaya memanfaatkan kemampuan manusia yang dimiliki secara optimal.

c) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

d) Pembangunan manusia menjadi dasar, baik dasar dalam penentuan tujuan pembangunan maupun dasar dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, terdapat empat prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain:

a) Produktivitas

Penduduk harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

b) Pemerataan.

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil

menfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c) Kesinambungan.

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

d) Pemberdayaan.

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Indeks Pembangunan manusia dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:

a) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)

Untuk menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat menggunakan pada indikator Angka Harapan Hidup saat lahir - AHH (*Life Expectancy)*. Angka harapan hidup sehat saat ini didefinisikan sebagairata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat atau penduduk.

b) Pengetahuan (*knowledge*).

Untuk menghitung dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling*) dan Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling*). Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun dan

cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah yaitu penduduk usia 25 tahun ke atas.

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

c) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Untuk menghitung standar hidup layak melalui indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota dengan tahun dasar 2012=100. Sedangkan perhitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

2.3.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat beberapa manfaat dari indeks pembangunan manusia, antara lain sebagai berikut:

a) Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
b) Mengukur keberhasilan daerah atau negara dalam pembangunan kualitas hidup penduduk atau masyarakat.

c) Menjadi salah satu indikator atau ukuran kinerja pemerintah.

d) Menjadi salah satu alokator dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.3.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam pengukuran indeks pembangunan manusia didasarkan pada berdasarkan tiga dimensi dasar yang meliputi:

a) Dimensi Kesehatan.

Dalam dimensi kesehatan pengukuran indeks pembangunan manusia didasarkan pada indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH).

$$Ikesehatan = \frac{\text{AHH} - \text{AHHmin}}{\text{AHHmaks} - \text{AHHmin}}$$

b) Dimensi Pendidikan.

Dalam dimensi pendidikan, hal yang penting dalam pembangunan manusia didasarkan pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

$$IHLS = \frac{\text{HLS} - \text{HLSmin}}{\text{HLSmaks} - \text{HLSmin}}$$

$$IRLS = \frac{\text{RLS} - \text{RLSmin}}{\text{RLSmaks} - \text{RLSmin}}$$

$$Ipendidikan = \frac{\text{IHLS} + \text{IRLS}}{2}$$

c) Dimensi Pengeluaran

Dimensi ini lebih cenderung pada pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari.

$$Ipengeluaran = \frac{\text{In(pengeluaran)} - \text{(pengeluaranmin)}}{\text{In(pengeluaranmaks)} - \text{(pengeluaranmin)}}$$

d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{\text{Ikesehatan x Ipendidikan Ipengeluaran}} \text{ x } 100$$

2.4 Jumlah Pengguna Telepon Selular.

Indonesia adalah salah satu negara yang paling awal mengadopsi teknologi secara komersial, yaitu pada saat telekomunikasi selular pertama kali dikenal dunia pada tahun 1984. Industri telekomunikasi memiliki peran baik dalam kehidupan masyarakat maupun perekonomian nasional. Pertumbuhan sektor jasa telekomunikasi merupakan yang tertinggi dalam perekonomian nasional jika dibandingkan sektor-sektor lainnya. Kelompok transportasi dan komunikasi juga kini menjadi salah satu kelompok kebutuhan pokok yang digunakan dalam penghitungan inflasi. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat tidak dapat dipungkiri telah memberikan perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan aktifitas bisnis.Jarak dan batas teritorial suatu negara tidak menjadi hambatan lagi dengan adanya teknologi telekomunikasi. Waverman, Meschi, dan Fuss (2005) menjelaskan bahwa jaringan telekomunikasi merupakan bagian dari modal sosial yang berlebihan; seperti pengeluaran untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur jalan. Kemajuan teknologi informasi semakin membantu masyarakat karena memberikan kemudahan dalam menunjang berbagai aktivitas dan telah berhasil mempengaruhi perilaku masyarakat. Dengan seiringnya waktu dalam kemajuan teknologi dan informasi, industri perbankan dituntut untuk menyeimbangkan dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada nasabahnya. Pasalnya, perilaku konvensional yang lambat dan rumit akan ditinggalkan oleh nasabahnya untuk beralih ke bank lain yang pelayanannya lebih baik. Menyadari ketatnya persaingan industri perbankan, maka inovasi pelayanan dengan fasilitas kemudahan yang ditawarkan harus mengadopsi kecanggihan teknologi melalui pemanfaatan atau penggunaan teknologi untuk transaksi-transaksi keuangan.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya penggunaan telepon seluler di negara-negara berkembang telah memberikan kontribusi terhadap munculnya layanan *branchless banking*, dengan demikian meningkatkan inklusi keuangan. Adanya peningkatan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat membantu mempersempit kesenjangan infrastruktur keuangan, dimana biaya jarak dan waktu yang sangat tinggi untuk layanan perbankan formal. Adanya kemajuan teknologi mendukung arus informasi yang lebih baik, dan data yang dikumpulkan pada deposan dapat digunakan untuk menganalisis kelayakan kredit yang lebih efisien dan untuk memfasilitasi deposito. Oleh karena itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti ponsel dapat meningkatkan akses ke fasilitas kredit dan deposito, memungkinkan alokasi kredit yang lebih efisien, memfasilitasi transfer keuangan, dan meningkatkan inklusi keuangan. Pada gilirannya, ini akan merangsang investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi.

Ada tiga karakteristik dari teknologi informasi dan komunikasi, antara lain:

1) teknologi informasi dan komunikasi ada dimana-mana dalam sektor bisnis
2) terjadinya peningkatan terus menerus karena itu dapat mengurangi biaya bagi pengguna
3) berkontribusi untuk inovasi dan pengembangan produk dan proses baru.

Di Indonesia, jasa-jasa penyelenggaraan telekomunikasi meliputi berbagai bentuk yang di kelompokkan sebagai berikut:

1) Jaringan telepon umum
    a. Jasa pelanggan telepon
    b. Jasa interkoneksi operator telekomunikasi
        - Interkoneksi jarak jauh internasional
        - Interkoneksi sambungan tetap dan bergerak

2) Jasa sambungan bergerak
    a. Jasa sambungan analog
    b. Jasa sambungan GSM
    c. Jasa sambungan PCN
3) Jasa satelit
4) Jasa lainnya:
    a. VSAT
    b. E-mail
    c. Kartu Telepon

Salah satu tantangan utama pemerintah dalam mendorong keuangan inklusif adalah kondisi demografi dan geografi (Bank Indonesia, 2014). Memperluas jangkauan perbankan di luar wilayah perkotaan membutuhkan biaya yang besar dan di sisi lain permintaan layanan dari masyarakat juga rendah (Dittus dan Klein, 2011). Semakin miskin sebuah rumah tangga, instrumen keuangan semakin dibutuhkan untuk mengelola kehidupannya. Penggunaan telepon selular berfungsi untuk mengurangi biaya transaksi, memudahkan akses ke kredit, fasilitas deposit, dan mendorong keuangan inklusif. Adanya korelasi yang kuat antara keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi didukung oleh luasnya persebaran penggunaan teknologi telepon selular (Andrianaivo dan Kpodar, 2012).

Menurut Omwansa (2015) kesuksesan dalam mengembangkan teknologi telepon selular disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu:

1) Persebaran telepon selular. Pertumbuhan pengguna telepon yang terus meningkat memiliki peran penting yang akan berdampak positif untuk berpenetrasi dengan cepat.
2) Kebutuhan akses kepada layanan keuangan. Masih rendahnya penduduk dewasa yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, menjadi

tugas bagi pemerintah dalam meningkatkan lembaga keuangan. Kemudahan akses dalam masyarakat menunjukkan system keuangan yang dapat dijangkau sehingga penduduk yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal akan terus meningkat.

3) Transaksi berbiaya rendah. Sistem keuangan inklusif dapat diwujudkan melalui layanan jasa keuangan yang berkualitas, mudah, jelas dan biaya terjangkau merupakan hal yang dibutuhkan dalam melakukan akses terhadap lembaga keuangan terutama bagi masyarakat miskin.

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan

Keuangan inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya keuangan inklusif menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal dan sebaliknya. Rendahnya keuangan inklusif menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal. Peningkatan tingkat keuangan inklusif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan jasa keuangan formal.

Meskipun sektor perbankan semakin berkembang, faktanya masih banyak masyarakat didalam suatu daerah yang belum dapat mengakses dan menggunakan jasa perbankan. Akses dan penggunaan jasa keuangan oleh masyarakat dapat diukur dengan indeks inklusi keuangan. Perkembangan sektor perbankan dapat meningkatkan akses dan pengguna jasa perbankan. Hal tersebut tentunya dapat menciptakan jasa perbankan semakin inklusif.

Dalam meningkatkan inklusi keuangan suatu daerah tak lepas dari pembangunan di daerah tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemudahan dalam mengakses jasa keuangan atau inklusi keuangan pada suatu daerah ialah pembangunan di daerah tersebut. Semakin baik pembangunan di suatu daerah maka semakin mudah pula masyarakat dalam mengakses jasa

keuangan perbankan yang mengindikasikan semakin tinggi indeks inklusi keuangan di daerah tersebut. Pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari segi sosial ekonomi seperti PDRB, pengangguran, melek huruf, dll serta kondisi infrastruktur seperti persentase penduduk pengguna telepon seluler dan internet,rasio panjang jalan,dan sebagainya (Sarma and Pais,2011).

PDRB memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan suatu daerah. Peningkatan PDRB merupakan salah satu cerminan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan kinerja perekonomian membaik. Kondisi perekonomian yang baik menjadi signal bagi perbankan untuk memperluas jaringannya sehingga akses perbankan semakin terbuka. Selain itu, peningkatan PDRB juga dapat mencerminkan peningkatan produktivitas masyarakat. Semakin produktif masyarakat dalam berbagai kegiatan perekonomian, maka semakin besar peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat, kesempatan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan semakin besar baik untuk menabung, melakukan investasi, ataupun untuk keperluan transaksi lainnya.

Telepon seluler dan internet memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Semakin berkembang telepon seluler dan internet maka akan meningkatkan inklusi keuangan suatu daerah. Perkembangan telepon seluler maupun internet menunjukkan adanya kemajuan dalam teknologi. Kedua teknologi ini dapat memperluas informasi dan mengurangi hambatan jarak dan waktu. Telepon seluler dan internet dimanfaatkan perbankan untuk memperluas akses pelayanan. Banyak perbankan yang sudah menggunakan internet dan telepon seluler sebagai media transaksi untuk mempermudah palayanan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan suatu daerah.IPM merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia dalam

3 dimensi yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM di suatu daerah maka akan menghasilkan masyarakat yang semakin berkualitas. Semakin berkualitas masyarakat dalam suatu daerah, semakin tinggi pula pengetahuan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal yang kemudian meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal. Hal ini mengindikasikan bahwa inklusi keuangan suatu daerah meningkat apabila IPM didaerah tersebut meningkat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi agar dapat memberikan gambaran penelitian. Beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah :

1. Andrianaivo. M., Kpodar. K. (2011) dengan penelitian yang berjudul "*Determinants of Financial Inclusion in Africa: A Dynamic Panel Data Approach*". Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan di Afrika periode 2005-2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *regresi data panel* dan variabel yang digunakan adalah GDP, literasi, suku bunga deposito, inflasi, akses internet. Hasil penelitian menunjukkan GDP, suku bunga deposito, inflasi, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan.
2. Sarma and Pais, 2011 dengan penelitian yang berjudul "*Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis*". Penelitian ini membahas tentang pengaruh beberapa variabel pembangunan terhadap inklusi keuangan pada 49 negara. Variabel yang digunakan adalah variabel sosial ekonomi, infrastruktur, sektor perbankan. Indeks pembangunan manusia dengan inklusi saling berhubungan. Faktor sosial ekonomi, kecuali pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan,

infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan serta sektor pebankan berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan

3. Sabila Yusrina (2016) dengan penelitian yang berjudul "Keuangan Inklusif: Pilar Strategi ASEAN Economic Community". Penelitian ini membahas tentang keuangan inklusif di ASEAN. Metode yang digunakan dengan analisis data panel dengan cross section 7 negara dan tahun dasar 2010-2014. Variabel dependen yaitu keuangan inklusif yang dihitung dengan indeks keuangan inklusif, sedangkan variabel independen meliputi IPM, populasi desa dan jalan aspal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keuangan inklusif di ASEAN rendah, yang diindikasi oleh nilai indeks keuangan inklusif < 0,3. Semua negara di ASEAN memiliki tingkat keuangan inklusif rendah, kecuali Brunei Darussalam dan Indonesia. IPM, populasi desa dan jalan aspal memiliki pengaruh positif terhadap keuangan inklusif di ASEAN.
4. Bintan Badriatul Ummah (2015) dengan penelitian yang berjudul "Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia". Penelitian ini menganalisis inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah panel tobit dengan *cross section* 33 provinsi dan tahun dasar analisis 2007-2011 melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial ekonomi dan pendekatan infrastruktur. Sedangkan hubungan inklusi keuangan dengan pemerataan pendapatan di Indonesia dianalisis dengan *Kausalitas Engle-Granger* pada panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah, yang ditunjukkan dengan nilai indeks inklusi keuangan kurang dari 0,3. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan rendah, kecuali Jakarta. Dilihat dari pendekatan sosial ekonomi, ukuran perekonomian dan ketimpangan

pendapatan mempengaruhi positif tingkat inklusi keuangan. Berbeda dari hipotesis penelitian, ketimpangan pendapatan yang semakin lebar mengakibatkan inklusi keuangan di Indonesia semakin tinggi. Dari pendekatan infrastruktur, jumlah pengguna telepon seluler dan internet mempengaruhi positif tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan dengan inklusi keuangan memiliki hubungan satu arah dimana ketimpangan pendapatan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia tetapi tidak sebaliknya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti *money mobile*, dapat mengurangi hambatan geografis sehingga meningkatkan inklusi keuangan.

5. Marlina Fransiska Purba (2016) melakukan penelitian mengenai kondisi inklusi keuangan pada kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah serta untuk menguji dan menganalisis pengaruh indeks inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Indeks inklusi keuangan diukur melalui indikator penetrasi perbankan, aksesibilitas perbankan dan juga penggunaan rekening. Kemiskinan diukur dengan tingkat kemiskinan yang menggambarkan penduduk miskin dalam masing-masing wilayah dan pemerataan pendapatan diukur menggunakan indeks gini. Jenis penelitian ini adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder 31 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2010-2014. Metode yang digunakan adalah analisis indeks inklusi keuangan dan analisis uji hubungan kausalitas antara indeks inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan indeks inklusi keuangan di kabupaten/kota Jawa Tengah termasuk dalam kategori indeks inklusi keuangan yang rendah, hanya dua wilayah yaitu Kabupaten/Kota Semarang dan Kota Surakarta yang memiliki indeks inklusi keuangan yang

tinggi. Hasil uji kausalitas indeks inklusi keuangan terhadap indeks gini menunjukkan hubungan satu arah dimana indeks gini mempengaruhi indeks inklusi keuangan. Sedangkan hubungan kausalitas indeks inklusi keuangan dengan tingkat kemiskinan menunjukkan tidak adanya hubungan kausalitas.

2.8 Kerangka Pikir

Dalam penelitian, kerangka pikir disajikan sebagai landasan dalam penulisan untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh terhadap keuangan inklusif di Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

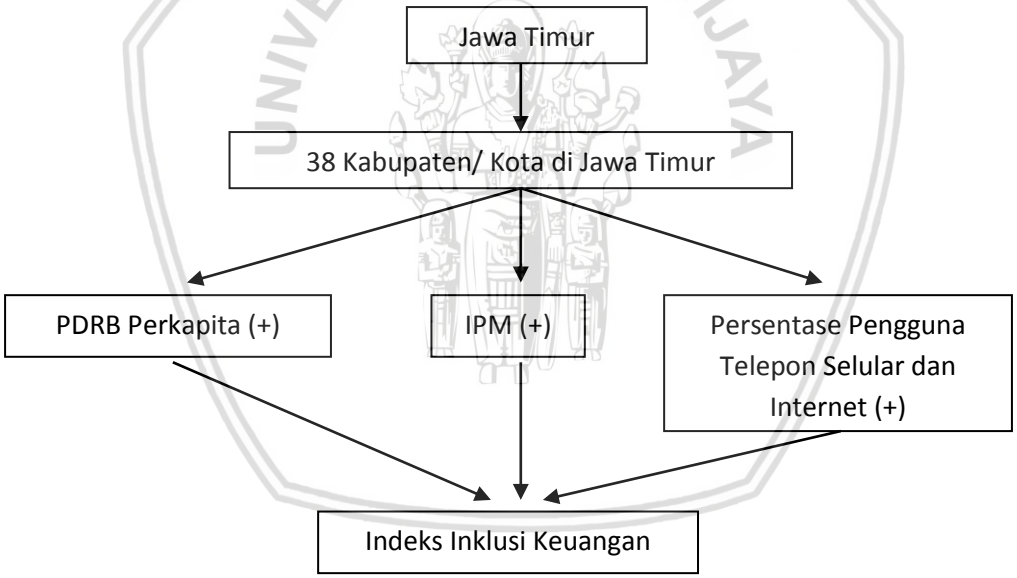

Sumber : Penulis, 2018

Dari kerangka pemikiran pada Gambar 2.1, penulis ingin mengkaji apakah PDRB, IPM dan Persentase Pengguna Telepon Selular memiliki pengaruh positif terhadap indeks keuangan inklusif. Untuk menguji pengaruh tersebut digunakan analisis regresi berganda data *cross section*.

2.9 Hipotesis

Adapun hipotesis untuk menguji pengaruh pembangunan daerah terhadap inklusi keuangan di Jawa Timur dengan menggunakan uji regresi data *cross section* dengan tingkat signifikansi 5 % adalah sebagai berikut :

H1 : Diduga PDRB Per Kapita berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan di Jawa Timur.

H2 : Diduga Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh positif terhadap keuangan inklusif di Jawa Timur.

H3 : Diduga persentase pengguna internet dan telepon seluler berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai tingkat inklusi keungan masing-masing kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur.

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).

Penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Widarjono (2013) merupakan data yang didapatkan tidak secara langsung melainkan dari sumber yang telah dipublikasikan oleh. Data tersebut bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan berbagai sumber yang terkait dengan penelitian. Periode dalam penelitian ini adalah tahun 2016 pada kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data, Satuan, dan Sumber Data

Indikator	Data	Sumber
Inklusi Keuangan	Jumlah rekening deposit per 1000 populasi dewasa	OJK
	Jumlah kantor Bank per 100.000 populasi dewasa	OJK
	Jumlah DPK terhadap PDRB dan jumlah kredit terhadap PDRB	OJK
Sosial Ekonomi	PDRB per kapita	BPS
	IPM	BPS
Infrastruktur	Persentase penduduk pengguna internet	BPS
	Persentase rumah tangga yang memiliki telpon seluler	BPS

Sumber: Penulis, 2018

3.3 Populasi dan Sampel

Santoso dan Tjiptono (2001) mengartikan populasi sebagai sekumpulan objek yang memiliki kesamaan satu atau beberapa hal dan membentuk suatu masalah pokok dalam suatu riset khusus. Sampel merupakan sebagian dari subjek populasi yang diteliti serta mampu mewakili populasi. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 1999). Pertimbangan – pertimbangan tersebut antara lain:

1. Kabupaten/ Kota yang berada di provinsi Jawa Timur
2. Memiliki ketersediaan data secara lengkap berupa indikator inklusi keuangan serta indikator pembangunan daerah.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Adapun yang menjadi varibel dependen dalam penelitian yaitu indeks inklusi keuangan sebagai proksi dari kemudahan dalam akses jasa keuangan. Sedangkan variabel independennya adalah PDRB, IPM, Melek huruf, Koefisien Gini sebagai proksi dari pendekatan sosial ekonomi serta

persentase penduduk pengguna internet dan telpon sebagai proksi dari pendekatan infrastruktur.

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan penyediaan akses bagi masyarakat khususnya menengah ke bawah dengan tujuan agar dapat memiliki dan menggunakan layanan sistem keuangan. Inklusi keuangan dapat dihitung dengan menggunakan suatu indeks inklusi keuangan. Adapun rumus untuk menghitung indeks inklusi keuangan yaitu:

$$\text{IIK}=\frac{1}{2}[X_1 + X_2]$$

Nilai X1 diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{X1}=\frac{\sqrt{d_{p+}^2 d_{a+}^2 d_u^2}}{\sqrt{w_p^2+w_{a+}^2 w_u^2}}$$

Sedangan nilai X2 diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{X2}=1-\frac{\sqrt{(wp-dp)^2+(wa-da)^2+(wu-du)^2}}{\sqrt{w_p^2+w_a^2+w_u^2}}$$

Indeks dari setiap dimensi, di, dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{di}=Wi\,\frac{Ai-mi}{Mi-mi};\ i=1,2,3$$

Dimana:

wi = bobot untuk dimensi i, $0 \le wi \le 1$

Ai = nilai terkini dari peubah i

mi = nilai minimum (batas bawah) dari peubah i

Mi = nilai maksimum (batas atas) dari peubah i

3.4.2 Variabel Independen

3.4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk kategori maju, berkembang, atau terbelakang. Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{\text{Ikesehatan x Ipendidikan Ipengeluaran}} \text{ x } 100$$

Dimana :

IPM <60 : IPM rendah.

60 ≤ IPM <70 : IPM sedang.

70 ≤ IPM <80 : IPM tinggi.

IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi.

3.4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu daerah tertentu. PDRB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi lingkup yang lebih kecil atau skala regional.

$$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRBt}{Jumlah\ Penduduk}$$

3.4.2.3 Jumlah Pengguna Telepon Selular dan Internet

Kemajuan teknologi informasi semakin membantu masyarakat karena memberikan kemudahan dalam menunjang berbagai aktivitas khususnya aktivitas dalam akses jasa keuangan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti ponsel dan internet dapat meningkatkan akses ke fasilitas kredit dan deposito, memungkinkan alokasi kredit yang lebih efisien, memfasilitasi transfer keuangan, dan meningkatkan inklusi keuangan.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Perhitungan Inklusi Keuangan

Analisis perhitungan inklusi keuangan digunakan untuk menganalisis tingkat inklusi keuangan dari 31 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Inklusi keuangan merupakan penyediaan akses bagi masyarakat khususnya menengah

ke bawah dengan tujuan agar dapat memiliki dan menggunakan layanan sistem keuangan. Inklusi keuangan dapat dihitung dengan menggunakan suatu indeks inklusi keuangan. Perhitungan indeks inklusi keuangan dalam penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang telah dilakukan oleh Sarma (2012). Indeks inklusi keuangan ini mencakup tiga dimensi yaitu dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jasa perbankan. Indeks inklusi keuangan dapat dihitung jika masing-masing dimensi telah dihitung nilai indeks dimensi.

Indeks dari setiap dimensi, di, dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$di = Wi \frac{Ai - mi}{Mi - mi}; i=1,2,3$$

Dimana:

wi = bobot untuk dimensi i, $0 \leq wi \leq 1$
Ai = nilai terkini dari peubah i
mi = nilai minimum (batas bawah) dari peubah i
Mi = nilai maksimum (batas atas) dari peubah i

Semakin tinggi nilai indeks suatu dimensi, samakin tinggi pula pencapaian di dalam dimensi tersebut. Untuk menghitung indeks setiap dimensi memerlukan bobot. Bobot ditentukan berdasarkan seberapa besar dimensi tersebut dapat mempengaruhi inklusi keuangan. Dalam penelitian ini, seluruh dimensi diasumsikan memiliki peranan yang sama penting dalam menentukan tingkat inklusi keuangan, sehingga masing-masing dimensi memiliki bobot sebesar 1. Selain menentukan bobot, untuk menghitung indeks setiap dimensi inklusi keuangan memerlukan batas atas dan batas bawah dari setiap indikator. Batas atas maupun batas bawah harus dijadikan nilai tetap. Batas bawah atau nilai minimum (mi) setiap dimensi dalam penelitian ini adalah 0. Sedangkan untuk menentukan batas atas atau nilai maksimum (Mi) setiap indikator, ditentukan

oleh sebaran masing-masing indikator.Ketiga dimensi inklusi keuangan beserta indikator yang digunakan dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel 3.2

Tabel 3.2 Indikator yang digunakan untuk menghitung IIK

Dimensi	Indikator	Sumber	Bobot	Batas Bawah (mi)	Batas Atas (Mi)
Penetrasi Perbankan (dp)	Jumlah rekening deposit di bank dibagi jumlah populasi dewasa	OJK	1	0	-
Ketersediaan Jasa Keuangan (da)	Jumlah kantor cabang perbankan dibagi jumlah populasi dewasa	OJK	1	0	-
Kegunaan (du)	Proporsi kredit dan tabungan terhadap PDRB	OJK	1	0	-

Sumber : Penulis, 2018

Perhitungan nilai indeks suatu dimensi akan menghasilkan nilai 0 <di< 1. Semakin tinggi nilai di, semakin tinggi pula perolehan kabupaten/kota di dimensi i. Jika terdapat 3 dimensi dari inklusi keuangan yang dihitung, yaitu p untuk penetrasi, a untuk ketersediaan, dan u untuk penggunaan, maka perolehan suatu kabupaten/ kota dari dimensi direpresentasikan dengan titik X = (dp,da,du) pada ruang 3-dimensi (Gambar 3.1). Dalam ruang 3-dimensi, titik O = (0,0,0) menunjukkan titik kondisi inklusi keuangan yang buruk, sedangkan titik W=(wp,wa,wu) menunjukkan kondisi inklusi keuangan yang ideal dari setiap dimensi.

Letak titik X, O, dan W merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat inklusi keuangan kabupaten/kota. Semakin besar jarak antara titik O dengan titik X, semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan. Semakin kecil jarak antara titik X dengan titik W, semakin tinggi tingkat inklusi keuangan. Kedua jarak tersebut dinormalisasi dengan jarak antara W dan O agar nilainya antara 0 dan 1. Oleh

karena itu, nilai indeks inklusi keuangan akan berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks, sistem keuangan semakin inklusif.

Jika jarak antara titik O dengan titik X dilambangkan dengan X1, yaitu:

$$X1=\frac{\sqrt{d_{p+}^2 d_{a+}^2 d_u^2}}{\sqrt{w_p^2+w_{a+}^2 w_u^2}}$$

dan jarak antara titik X dengan titik W dilambangkan dengan X2,

$$X2=1-\frac{\sqrt{(wp-dp)^2+(wa-da)^2+(wu-du)^2}}{\sqrt{w_p^2+w_a^2+w_u^2}}$$

Maka nilai indeks inklusi keuangan adalah rata-rata keduanya,

$$IIK=\frac{1}{2}[X_1+X_2]$$

Jika digambarkan ke dalam ruang tiga dimensi, maka indeks inklusi keuangan adalah sebagai berikut

Gambar 3.1 Grafik Tiga Dimensi Indeks Inklusi Keuangan

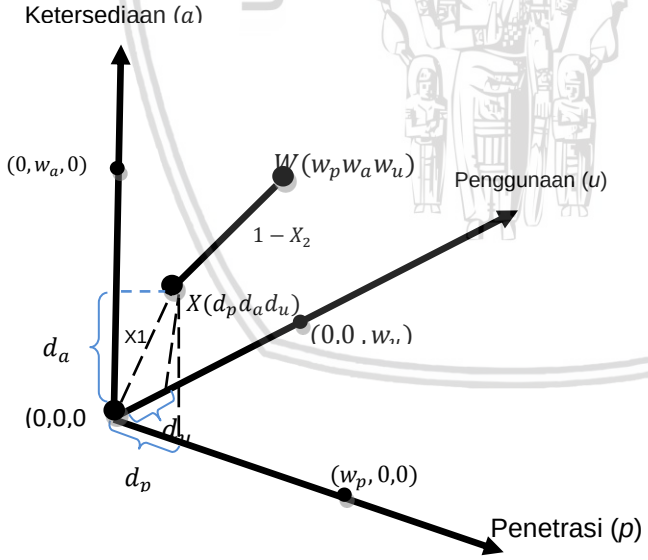

Sumber : Sarma (2012)

Nilai indeks inklusi keuangan berada antara 0 dan 1. Nilai IIK=1 menunjukkan kabupaten/ kota itu memiliki kondisi inklusi keuangan terbaik di antara kabupaten/kota yang lain. Sedangkan nilai IIK=0 menunjukkan kabupaten/

kota tersebut memiliki kondisi inklusi keuangan paling buruk. Tingkat inklusi keuangan semakin baik jika nilai indeks inklusi keuangan mendekati 1.

Nilai indeks inklusi keuangan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, antara lain (Sarma, 2012):

a) 0,6 < IIK ≤ 1 menunjukkan tingkat inklusi keuangan tinggi
b) 0,3 ≤ IIK≤ 0,6 menunjukkan tingkat inklusi keuangan sedang
c) ≤ 0,3 menunjukkan tingkat inklusi keuangan rendah

3.5.2 Analisis Permodelan Data Panel

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel, sehingga analisis yang dilakukan adalah regresi data panel. Regresi data panel merupakan sebuah teknik regresi di mana data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section* (Widarjono, 2013). Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari penggunaan data panel jika dibandingkan dengan dua jenis data lainnya, yaitu sebagai berikut (Ghozali,2006):

1. Unit dalam data panel bersifat heterogen karena data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, kota, negara, atau objek lainnya sepanjang waktu. Teknik yang digunakan pun dapat memasukkan unsur heteroginitas secara eksplisit untuk setiap variabel individu secara spesifik.
2. Data panel memberikan informasi yang lebih informatif, variasi, rendah tingkat kolonieritas antar variabel, lebih besar *degree of freedom*, serta lebih efisien.
3. Data panel cocok digunakan untuk studi perubahan dinamis (*dynamic change*).

4. Data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi melalui data murni *time series* atau *cross section* saja.
5. Data panel dapat mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.

Model regresi data panel memasukkan unsur *cross section* dan *time series* di dalam persamaan. Data yang digunakan dalam penelitian memiliki persamaan sebagai berikut :

Indeks Inklusi Keuangan= f (PDRB, IPM, Jumlah Pengguna Telepon Seluler)

Sehingga, model regresi panelnya adalah:

$$IIKit = \beta 0 + \beta 1PDRBit + \beta 2IPMit + \beta 3Teleponselulerit + \mathcal{E}it$$

Terdapat tiga metode yang biasa digunakan untuk melakukan estimasi model regresi data panel. Metode tersebut yaitu metode *pooled ordinary least square* (*common effect*), metode *least square dummy variable* (*fixed effect*), dan metode *random effect*.

3.5.2.1 Metode Common Effect (Pooled Ordinary Least Square)

Metode *common effect* adalah teknik yang paling sederhana dalam melakukan estimasi model regresi data panel. Metode comoon effect merupakan metode paling sederhana dimana kombinasi data *time series* dan *cross section* digabungkan tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, dengan kata lain koefisien tetap antar waktu dan individu. Dalam pendekatan yang disebut juga dengan *pooled ordinary least square* ini, perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu sehingga dimensi individu maupun waktu tidak diperhatikan (Widarjono, 2013).

Model persamaan regresi *pooled ordinary least square* sama dengan model regresi data panel pada umumnya. Di mana i adalah unit *cross section* dan t adalah tahun periode waktu (Ghozali, 2006).

3.5.2.2 *Fixed Effect*

Tekhnik model *fixed effect* merupakan tekhnik yang mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini didasarkan pada adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar waktu (*time invariant*). Model estimasi ini seringkali disebut dengan tekhnik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV).

3.5.2.3 Random Effect

Metode ini menyelesaikan masalah yang timbul dari penggunaan variabel *dummy* pada metode *fixed effect* berupa berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*/df) yang berimbas pada berkurangnya efisiensi parameter. Masalah dari penggunaan variabel *dummy* tersebut diselesaikan melalui metode *random effect* yaitu dengan menggunakan variabel gangguan (*error term*) yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. Pada metode *random effect*, diasumsikan setiap individu memiliki perbedaan intersep dan intersep tersebut adalah variabel random atau stokastik.

3.5.3 Uji Spesifikasi Model

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam mengestimasi model menggunakan data panel, yaitu: 1) *Ordinary least square,* 2) *Fixed Effect,* dan 3) *Random Effect*. Untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian dilakukan uji spesifikasi model.

3.5.3.1 Uji Chow

Terjadinya perubahan struktural dapat menyebabkan nilai parameter estimasi tidak sama dalam periode penelitian sehingga terdapat perbedaan dalam intersep atau *slope* atau kemungkinan adanya perbedaan intersep maupun *slope* dalam regresi. Untuk mengetahui bahwa terdapat perbedaan

intersep antar *cross section* dapat diuji dengan uji F statistik (Widarjono, 2013 :362). Uji F digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy, dengan melihat *sum of squared residuals* (RSS). Adapun uji f statistik adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{RSS^1 - RSS^2/M}{\frac{RSS^2}{(n-k)}}$$

Dimana :

RSS1 : *residual sum of squared* teknik tanpa *variabel dummy* (*common effect*)

RSS2 : *residual sum of squared* teknik dengan *variabel dummy (fixed effect*)

M : numerator

n-k : denumerator

Hipotesis pada uji Chow adalah :

H0 : Common Effect Method (CEM)

H1 : Fixed Effect Method (FEM)

Apabila Probabilitas Cross Section F kurang dari 5%, maka H0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Method (FEM) dan apabila Probabilitas Cross Section F lebih dari 5% artinya menerima H0, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Common Effect Method (CEM).

3.5.3.2 Uji Hausman

Pemilihan model antara Fixed Eddecct dan Random Effect dilakukan denga menggunakan uji Hausman. Uji Hausman merupakan salah satu bentuk *chi-square test* dan dilakukan berdasarkan bentuk kuadrat dan selisih antara

konsekuen estimator dengan efisien estimator. Pada model analisis data panel dengan efek tetap diperlukan estimator yang konsisten. Sedangkan pada model analisis data panel dengan efek acak diperoleh estimator yang efisien. Untuk itu dilakukan uji hipotesis apakah efek individu tidak berkorelasi atau berkorelasi dengan variabel bebas.

Hipotesis :

H0 = model efek random

H1 = model efek tetap

Statistik Uji Hausman dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$H = X^2_{(k)} = (\beta_{re} - \beta_{fe})\,(\Sigma fe - \Sigma re)^{-1}(\beta_{re} - \beta_{fe})$$

Dimana :

β_{re} = estimator metode efek random

β_{fe} = estimator metode efek tetap

Σre = matrik koefisien kovarian pada metode efek random

Σfe = matrik koefisien kovarian pada metode efek tetap

K = derajat bebas (jumlah parameter)

Apabila Probabilitas Cross Section F kurang dari 5%, maka H0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Method (FEM) dan apabila Probabilitas Cross Section F lebih dari 5% artinya menerima H0, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Random Effect Method (REM).

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan analisis regresi, terdapat sebuah asumsi klasik yang harus dipenuhi agar hasil yang kita peroleh dari analisis regresi valid dan dapat dipercaya. Pengujian Asumsi Klasik terdiri dari 4 buah asumsi yaitu, Uji Multikolenearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Normalitas.

3.5.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi kuat antar variabel independen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara melihat nilai R-Square (R2) yang tinggi dan variabel independen yang signifikan hanya sedikit.

Dampak adanya multikolinearitas antara lain; *pertama,* estimator masih bersifat BLUE dengan adanya multikolinearitas namun estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. *Kedua,* akibat dampak pertama maka interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan nilai hitung statistic uji t akan kecil sehingga membuat variabel independen secara statistic tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. *Ketiga,* walaupun secara individu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen melalui uji statistik t, namun nilai koefisien determinasi R2 masih bisa relatif tinggi.

Adanya multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih dari 10 maka terdapat multikolinearitas dalam model.

3.5.4.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah pengujian model regresi untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual yang ada dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Heteroskedastisitas sering ditemui dalam data cross section. Varians gangguan (*residual* atau *error terms*) akan terkait dengan besar kecilnya masing-masing cross section tersebut (misalnya perusahaan). Perusahaan yang besar akan mempunyai varian variabel gangguan yang lebih besar karena skala operasional perusahaan besar lebih fluktuatif dari pada perusahaan kecil. Oleh karena itu, masalah

heteroskedastisitas sering ditemui pada data cross section, sementara itu data time series jarang mengandung unsur heteroskedastisitas.

Melihat ada tidaknya masalah heterokedastisitas dilakukan dengan uji White. Dengan membandingkan nilai chi-square uji White dengan chi-square tabel dengan ketentuan jika nilai chi-square kurang darisama dengan chi-square tabel maka varians residual sama dari pengamatan ke pengamatan (homokedastisitas). Sebaliknya jika nilai chi-square uji White lebih dari chi-square tabel maka varians residual tidak sama (heterokedastisitas).

3.5.4.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Deteksi Autokorelasi bisa dilihat dengan menggunakan uji Durbin-Watson yang dapat diketahui melalui nilai Durbin-Watson Statistik. Dimana ketika menggunakan uji Durbin-Watson, nilai Durbin-Watson hitung(d) yang diperoleh dibandingkan dengan nilai d-tabel. Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut :

a. Jika d < dl, berarti terdapat autokorelasi positif

b. Jika d > (4 – dl), berarti terdapat autokorelasi negatif

c. Jika du < d < (4 – dl), berarti tidak terdapat autokorelasi

d. Jika dl ≤ d ≤ du atau (4 – du), berarti tidak dapat disimpulkan

3.5.4.4 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah residual hasil regresi telah berdistribusi normal, atau bisa dikatakan memusat pada nilai rata-rata data tersebut. Apabila data tersebut tidak terdistribusi normal maka akan sulit bagi peneliti untuk melakukan analisis. Pada uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik histogram untuk melihat daerah penyebaran data. Pada pengujian ini dapat dilihat dari nilai Jarque-Bera

(J-B) dimana jika nilai J-B lebih kecil dari 2 maka data signifikan berdistribusi normal atau dapat pula dilihat dari nilai probabilitas dimana apabila probabilitas di atas 0,05 maka data telah terdistribusi normal.

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Terdapat beberapa pengujian dalam menguji keakuratan sebuah data. Uji tersebut diantaranya adalah uji signifikansi parameter secara parsial (uji t), uji signifikansi parameter secara serempak (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2).

3.5.5.1 Uji Statistik t

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa uji t merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat signifikansi antar variabel dan juga menguji secara individu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis pada uji statistic t adalah sebagai berikut:

1. H0 : bi ≤ 0, artinya variabel independen ke *i* secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen
2. H1 : bi > 0, artinya variabel independen ke *i* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen

Pada level signifikansi 5%, maka berikut ini adalah kriteria yang digunakan:

1. Apabila t-statistik secara absolut lebih besar dari t-kritis (t-statistik > t-kritis) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya secara individu variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila t-statistik secara absolut lebih kecil dari t-kritis (t-statistik < t-kritis) maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya secara individu masing-masing variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.5.2 Uji Statistik F

Uji signifikansi simultan atau uji F digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Widarjono.2007:73). Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

1. H0 : b1 = b2 = b3 = 0, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
2. H1 : b1 ≠ b2 = b3 ≠ 0, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Pada level signifikansi 1% dan 5%, maka berikut ini adalahkriteria yang digunakan:

1. Apabila F-statistik lebih besar dari F-kritis (F-statistik > F-kritis) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2. Apabila F-statistik lebih kecil atau sama dengan dari F-kritis (F-statistik ≤ F-kritis) maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2) dan Adjusted R^2

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa seberapabesar variabel independen dapat menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu ketika semua variasi variabel dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Persoalan dalam penggunaan R^2 adalah nilai R^2 selalu naik ketika variabel independen dalam model ditambah meskipun penambahan tersebut belum tentu memiliki pembenaran dari teori ekonomi yang ada. Oleh karena itu,

selain menggunakan R^2, terdapat pula koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted* R^2). *Adjusted* R^2 merupakan alternatif lain supaya nilai R^2 tidak merupakan fungsi dari variabel independen. Nilai koefisien *adjusted* R^2 akan memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai R^2 (Widarjono, 2013).

Kriteria yang digunakan untuk melihat nilai R^2 dan *adjusted* R^2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 atau *adjusted* R^2 mendekati nol atau bernilai kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.
2. Nilai R^2 atau *adjusted* R^2 mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan kebutuhan informasi untuk memprediksi variabel dependen.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur merupakan sebuah Provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kota Jawa Timur terletak di Surabaya.Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya 42.030.633 jiwa (sensus 2017). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung). Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

Secara geografi, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudera Hindia di selatan, serta provinsi Jawa Tengah di barat. Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 km, lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 km. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 km sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau-pulau, yang paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan yang paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil yakni Nusa Barung, dan Pulau Sempu. Secara demografi, jumlah penduduk Jawa Timur

pada tahun 2017 adalah 42.030 633 jiwa, dengan kepadatan 884 jiwa/km2. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi Jawa Timur adalah kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 3.046.218 jiwa, sedang kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya sebanyak 3.195.487. Laju pertumbuhan penduduk adalah 0,76% per tahun (2010).

Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten, dan 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Pada penelitian ini hanya mengambil sampel 31 kabupaten/ kota di Jawa Timur yang terdiri dari 9 kota dan 22 kabupaten.

4.1.1 Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang dengan luas wilayah 136,74 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 200.485 jiwa yang terbagi dalam 3 kecamatan, 4 kelurahan,dan 20 desa (Kemendagri, 2015). Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Perekonomian kota Batu banyak ditunjang dari sektor pariwisata dan pertanian. Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa, sehingga PDB kota Batu ditunjang dari sektor pariwisata ini. Di bidang pertanian, Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia yang membuatnya dijuluki sebagai *kota apel*.

4.1.2 Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta sekaligus kota metropolitan di provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 350,54 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 2.833.924 jiwa (Kemendagri, 2015). Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Surabaya memiliki 3 sektor penunjang

perekonomian yakni perdagangan, hotel dan restoran, serta angkutan/transportasi. Ketiga sektor ini sangat dominan dan berperan besar menyumbang pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

4.1.3 Kota Mojokerto

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan luas wilayah 16,47 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 133.675 jiwa yang terdiri dari 2 kecamatan dan 18 kelurahan (Kemendagri, 2015). Sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Mojokerto adalah perdagangan, serta hotel dan restoran. Tingginya sektor perdagangan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB kota Mojokerto cukup beralasan, karena Mojokerto sebagai wilayah perkotaan sangat logis jika sektor perdagangan, serta hotel dan restoran berkembang cukup pesat. Terlebih Kota Mojokerto sebagai salah satu wilayah penyangga Kota Metropolitan Surabaya, sehingga perkembangan sektor perdagangan di Kota Surabaya akan mempunyai imbas terhadap Kota Mojokerto.

4.1.4 Kota Malang

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya dengan luas wilayah 145,28 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 871.145 jiwa yang memiliki 5 kecamatan dan 57 kelurahan (Kemendagri, 2015). Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki berbagai perguruan tinggi terbaik. Selain itu, kota ini merupakan kota pariwisata karena alamnya yang menawan yang dikelilingi oleh pegunungan serta udaranya yang sejuk. Malang pun terkenal sebagai kota bunga karena banyaknya bunga yang menghiasi kota. Pemberi sumbangan paling banyak untuk pertumbuhan ekonomi di kota Malang adalan sektor industri dan perdagangan.

4.1.5 Kota Pasuruan

Kota Pasuruan merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan luas wilayah 35,29 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 195 jiwa.178 jiwa yang memiliki 3 kecamatan dan 34 kelurahan (Kemendagri, 2015). Kota Pasuruan berada di jalur utama pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali yang menjadikannya sebagai kota dengan prospek ekonomi yang besar di kawasan Indonesia bagian timur dan memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan.

4.1.6 Kota Probolinggo

Kota Probolinggo merupakan kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri menurut jumlah penduduk dengan luas wilayah 56,67 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 233.691 jiwa yang memiliki 5 kecamatan dan 29 kelurahan (Kemendagri, 2015). Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian kota Probolinggo adalah sektor perdaganggan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; industri pengolahan; serta sektor jasa-jasa.

4.1.7 Kota Blitar

Kota Blitar merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan luas wilayah 32,57 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 141.194 jiwa yang memiliki 3 kecamatan dan 21 kelurahan (Kemendagri, 2015). Kota Blitar disebut sebagai Kota Proklamator karena di kota ini lahir tokoh proklamator yaitu presiden Ir. Soekarno. Kegiatan ekonomi penduduk Kota Blitar beraneka ragam, antara lain kegiatan pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Kegiatan perdagangan berjalan cukup kondusif terutama yang berada di jalan-jalan utama yang ada di kota Blitar. Selain bertumpu pada sektor pertanian juga terdapat sektor peternakan yang cukup berperan dalam perekonomian.

4.1.8 Kota Kediri

Kota Kediri merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang dengan luas wilayah 63,40 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 290.495 jiwa yang memiliki 3 kecamatan dan 46 kelurahan (Kemendagri, 2015). Kota Kediri terbelah oleh sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 kilometer.Kediri dikenal merupakan pusat perdagangan utama untuk gula dan industri rokok terbesar di Indonesia. Di kota ini juga, pabrik rokok kretek Gudang Garam berdiri dan berkembang.

4.1.9 Kota Madiun

Kota Madiun merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan luas wilayah 33,92 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 189.966 jiwa yang memiliki 3 kecamatan dan 27 kelurahan (Kemendagri, 2015). Sektor yang paling menonjol di kota Madiun adalah pertanian padi, kedelai, palawija, perkebunankakao, kopi, mangga, durian, rambutan serta produk hasil hutan dan produk olahan lainnya seperti kerajinan kayu jati dan lain sebagainya. Durian dan kakao banyak di budidayakan di kecamatan Dagangan, dan kecamatan Kare. Kebun kopi dengan skala besar di budidayakan di Kandangan, kecamatan Kare, yang merupakan peninggalan Belanda.

4.1.10 Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.200.563 jiwa yang memiliki 18 kecamatan, 26 kelurahan dan 330 desa (Kemendagri, 2015). Gresik dikenal sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Gresik juga merupakan penghasil perikanan yang cukup signifikan, baik perikanan laut, tambak, maupun perikanan darat. Gresik juga terdapat sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 2.200 MW.Selain itu perekonomian masyarakat Gresik banyak ditopang dari sektor

wiraswasta. Salah satunya yaitu industri songkok, pengrajin tas, pengrajin perhiasan emas & perak, dan industri garment (konveksi). Di utara kota Gresik juga tepatnya di kota Sedayu merupakan penghasil sarang burung walet terbesar di Indonesia.

4.1.11 Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 634,38 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.929.585 jiwa yang memiliki 18 kecamatan, 31 kelurahan dan 322 desa (Kemendagri, 2015). Perikanan, industri dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), dekat dengan pelabuhan Tanjung Perak maupun bandara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo.

4.1.12 Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 717,83 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.076.327 jiwa yang memiliki 18 kecamatan, 5 kelurahan dan 299 desa (Kemendagri, 2015). Kabupaten Mojokerto memiliki potensi unggulan di sektor industri, pariwisata, tanaman pangan perkebunan dan holtikultura, perdagangan, kehutanan, perhubungan, serta pertambangan.

4.1.13 Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.115,09 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.354.231 jiwa yang memiliki 21 kecamatan, 4 kelurahan dan 303 desa (Kemendagri, 2015). Sektor pertanian menyumbang 38,16% total PDRB kabupaten Jombang. Sektor pertanian memiliki 31% penduduk usia kerja. Tradisi,

kemudahan yang disediakan oleh alam, dan adanya terobosan baru rupanya menjadikan alasan untuk bertahan. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh material letusan gunung Kelud yang terbawa arus deras sungai Brantas dan kali Konto serta sungai-sungai kecil lainnya. Sistem pengairan juga sangat ekstensif, dan memadai, dan 83% di antaranya merupakan irigasi teknis.

4.1.14 Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.998,54 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.139.282 jiwa yang memiliki 27 kecamatan, 4 kelurahan dan 328 desa (Kemendagri, 2015). Sektor yang paling berkontribusi di kabupaten Sumenep dalam besaran jumlah PDRB adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, restoran.Sektor yang berkontribusi besar juga adalah sektor pertambangan dan penggalian.

4.1.15 Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.001,44 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.154.827 jiwa yang memiliki 18 kecamatan, 8 kelurahan dan 273 desa (Kemendagri, 2015). Sektor perekonomian yang berkembang di kabupaten Bangkalan antara lain adalah sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan.

4.1.16 Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 5.782,40 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 2.035.111 jiwa yang memiliki 24 kecamatan, 28 kelurahan dan 189 desa (Kemendagri, 2015). Hampir separuh dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Banyuwangi bergerak di bidang pertanian dengan luas tanah persawahan sekitar 66.152 Ha atau sekitar 11,44% sehingga mempunyai pengaruh

terhadap struktur ekonomi sebesar 49,18%. Sektor ekonomi kedua yang mempunyai peranan terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan besar sumbangannya terhadap perekonomian kabupaten Banyuwangi sebesar 24,05%.

4.1.17 Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 3.092,34 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 2.451.081 jiwa yang memiliki 31 kecamatan, 22 kelurahan dan 245 desa (Kemendagri, 2015). Sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Perkebunan yang ada dikelola oleh perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan perusahaan daerah yaitu PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan). Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/ kulit cerutu. Di pasaran dunia tembakau Jember sangat dikenal di Jerman dan Belanda

4.1.18 Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 3.530,65 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 2.764.969 jiwa yang memiliki 33 kecamatan,12 kelurahan dan 378 desa (Kemendagri, 2015). Sumber perekonomian utama masyarakat di kabupaten Malang adalah dari sektor agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan dan peternakan.Industri di kabupaten Malang banyak bergerak dibidang pengolahan dan perdagangan hasil bumi.

4.1.19 Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.474,02 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.723.539 jiwa yang memiliki 24 kecamatan,24 kelurahan dan 341 desa (Kemendagri, 2015). Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2015, 15,64% penduduk terserap ke sektor perindustrian. Jenis industri yang dominan ditemukan di kabupaten Pasuruan adalah industri makanan (21%), industri furniture (21%), industri tekstil (16%) serta industri pakaian jadi (10%), sementara jenis industri lainnya memiliki proporsi kurang dari 10%. Sementara ditinjau dari jumlah pekerjanya, jenis industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki (20%), industri makanan (19%), industri pengolahan tembakau (17%), industri pakaian jadi (10%), serta industri tekstil (7%).

4.1.20 Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.790,90 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.064.343 jiwa yang memiliki 21 kecamatan,21 kelurahan dan 168 desa (Kemendagri, 2015). Faktor penunjang perekonomian di kabupaten Lumajang pada 2008-2012 karena adanya perubahan dari sektor agraris kepada industri akan menyebabkan adanya perkembangan industri di kabupaten Lumajang baik di bidang industri, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Perkembangan industri yang cukup pesat ini banyak menyerap tenaga kerja di Lumajang.Mulai pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga.

4.1.21 Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 3.092,34 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.420.634 jiwa yang memiliki 26 kecamatan, 1 kelurahan dan 343 desa (Kemendagri,

2015). Sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kediri didasarkan atas perkembangan dari sektor-sektor ekonomi serta didasarkan pada potensi yang pada dasarnya meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, hutan, pariwisata, industri, dan sektor lain yang terdapat di kabupaten Kediri.

4.1.22 Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.224,25 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.151.025 jiwa yang memiliki 20 kecamatan, 20 kelurahan dan 264 desa (Kemendagri, 2015). Sektor unggulan kabupaten Nganjuk adalah di sektor pertanian, peternakan, industri kecil dan kerajinan rakyat, serta pariwisata.

4.1.23 Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.055,65 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.173.065 jiwa yang memiliki 19 kecamatan, 14 kelurahan dan 257 desa (Kemendagri, 2015). Kabupaten Tulungagung memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Sektor unggulan meliputi sektor pertanian, pariwisata, perikanan, peternakan, perdagangan, dan Industri

4.1.24 Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.336,48 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.281.364 jiwa yang memiliki 22 kecamatan, 28 kelurahan dan 220 desa (Kemendagri, 2015). Sektor unggulan di kabupaten Blitar diantaranya adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, dan jasa-jasa.

4.1.25 Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.037,58 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 593.877

jiwa yang memiliki 15 kecamatan, 8 kelurahan dan 198 desa (Kemendagri, 2015). Pertumbuhan ekonomi kabupaten Madiun yang paling besar meliputi sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB kabupaten Madiun.Sektor lainnya yang memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Madiun adalah sektor pertanian.

4.1.26 Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.295,98 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 994.393 jiwa yang memiliki 19 kecamatan, 4 kelurahan dan 213 desa (Kemendagri, 2015). Perekonomian kabupaten Ngawi masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan sektor ini terhadap total PDRB. Sektor lainnya yang memberi sumbangan cukup besar terhadap perekonomian kabupaten Ngawi adalah sektor perdagangan.

4.1.27 Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten kota di Jawa Timur dengan luas wilayah 688,84 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 672.142 jiwa yang memiliki 18 kecamatan, 28 kelurahan dan 207 desa (Kemendagri, 2015). Sektor-sektor yang memberikan peran besar terhadap peningkatan ekonomi wilayah adalah sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor jasa dan industri pengolahan. Keempat sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 85,69% terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, sisanya (14,31%) disumbang oleh sektor penggalian, sektor listrik, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan sektor keuangan.

4.1.28 Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.305,70 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.009.701

jiwa yang memiliki 21 kecamatan, 26 kelurahan dan 279 desa (Kemendagri, 2015). Struktur ekonomi kabupaten Ponorogo didominasi oleh sektor primer yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian. Kemudian sektor tersier yaitu perdagangan, hotel, dan restoran, angkutan & komunikasi, keuangan, persewaan & jasa, perusahaan, serta jasa-jasa.

4.1.29 Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 2.198,79 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.408.089 jiwa yang memiliki 27 kecamatan, 11 kelurahan dan 419 desa (Kemendagri, 2015). Sektor unggulan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan ada 4 sektor unggulan yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, bangunan, serta sektor jasa-jasa.

4.1.30 Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.834,15 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.247.794 jiwa yang memiliki 20 kecamatan, 17 kelurahan dan 311 desa (Kemendagri, 2015). Sektor perekonomian utama adalah perdagangan, industri pengolahan dan pertambangan.Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di sektor pertambangan.

4.1.31 Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.782,05 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.438.957 jiwa yang memiliki 27 kecamatan, 12 kelurahan dan 462 desa (Kemendagri, 2015). Sektor unggulan kabupaten Lamongan antara lain, sektor pertanian, industri pengolahan, bangunan/ kontruksi, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan & jasa perusahaan, serta sektor jasa.

4.2 Analisis Tingkat Inklusi Keuangan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur

Inklusi keuangan merupakan penyediaan akses bagi masyarakat khususnya menengah ke bawah dengan tujuan agar dapat memiliki dan menggunakan layanan sistem keuangan. Inklusi keuangan dapat dihitung dengan menggunakan indeks inklusi keuangan (Sarma, 2012). Indeks inklusi keuangan dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator, antara lain: indikator penetrasi perbankan, indikator aksesibilitas jasa keuangan (perbankan), dan indikator *usage* (penggunaan) rekening.

4.2.1 Indikator Penetrasi Perbankan

Sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin atau dengan kata lain harus dapat menjangkau secara luas para penggunanya (penetrasi perbankan). Salah satu ukuran dari dimensi penetrasi perbankan yaitu jumlah rekening deposit yang ada diperbankan. Dalam penelitian ini, penetrasi perbankan pada setiap wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur digambarkan dengan jumlah kepemilikan rekening deposit pada industri perbankan. Berikut ini digunakan data informasi berupa jumlah kepemilikan rekening deposit per 1.000 populasi dewasa yang ada pada masing-masing wilayah yang menjadi objek penelitian:

Tabel 4.1 Jumlah Rekening Deposit Per 1.000 Populasi Dewasa

NO	Kota / Kabupaten	Jumlah Rekening Deposit Per 1.000 Populasi Dewasa		
		2014	2015	2016
1	Kota Batu	357	360	374
2	Kota Surabaya	2490	2494	2497
3	Kota Mojokerto	3620	3623	3625
4	Kota Malang	1916	1918	1921
5	Kota Pasuruan	1225	1226	1227
6	Kota Probolinggo	965	967	969
7	Kota Blitar	2210	2221	2232
8	Kota Kediri	1714	1721	1728
9	Kota Madiun	2814	2823	2829
10	Kab Gresik	794	814	823

NO	Kota / Kabupaten	Jumlah Rekening Deposit Per 1.000 Populasi Dewasa		
		2014	2015	2016
11	Kab Sidoarjo	831	842	849
12	Kab Mojokerto	330	344	353
13	Kab Jombang	651	662	674
14	Kab Sumenep	365	369	374
15	Kab Bangkalan	718	722	729
16	Kab Banyuwangi	684	690	696
17	Kab Jember	618	626	635
18	Kab Malang	634	639	648
19	Kab Pasuruan	413	422	429
20	Kab Lumajang	549	557	564
21	Kab Kediri	742	757	768
22	Kab Nganjuk	622	631	638
23	Kab Tulungagung	740	747	754
24	Kab Blitar	554	563	568
25	Kab Madiun	772	779	788
26	Kab Ngawi	674	684	692
27	Kab Magetan	767	775	789
28	Kab Ponorogo	792	803	811
29	Kab Bojonegoro	575	583	594
30	Kab Tuban	484	495	502
31	Kab Lamongan	705	714	725

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah, 2018

Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah kepemilikan rekening deposit meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya rekening deposit mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat di wilayah kota dan kabupaten yang memiliki rekening deposit di perbankan. Masih terdapat potensi bagi perbankan untuk terus meningkatkan kepemilikan rekening deposit di wilayahnya masing-masing.

Tabel 4.1 juga menggambarkan bahwa hampir seluruh wilayah kota memiliki jumlah kepemilikan rekening deposit yang besar jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Angka penetrasi perbankan tertinggi terjadi di wilayah kota Mojokerto yaitu pada tahun 2016 sebesar 3.625 per 1.000 populasi dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap orang

memiliki 3 sampai 4 rekening di bank yang ada di wilayah tersebut. Adapun salah satu penyebab tingginya penetrasi perbankan di wilayah kota Mojokerto yaitu kondisi wilayahnya yang kecil dengan jumlah penduduk yang kecil pula, bahkan merupakan wilayah terkecil di provinsi Jawa Timur. Sehingga, keberadaan perbankan dapat lebih mudah menjangkau masyarakat yang ada di sekitarnya dan lebih mudah untuk memperkenalkan produk-produk perbankan.

Sedangkan kota Surabaya memiliki penetrasi perbankan tertinggi kedua yaitu tercatat jumlah rekening deposit di kota Surabaya tahun 2016 sebesar 2.497. Berbeda dengan kota Mojokerto yang memiliki luas wilayah yang relatif kecil dan jumlah penduduk yang kecil pula, kota Surabaya justru memliki luas wilayah yang paling besar dengan jumlah penduduk terbesar pula di provinsi Jawa Timur. Bahkan, kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Meskipun demikian, kota Surabaya memiliki penetrasi tertinggi setelah kota Mojokerto. Hal ini dikarenakan tingginya aktifitas perekonomian di Surabaya sehingga peran perbankan sangat dibutuhkan di wilayah tersebut. Perbankan juga lebih mudah menjangkau masyarakat didaerah perkotaan besar dimana masyarakatnya sudah lebih banyak mengenal layanan jasa perbankan.

Sebaliknya, kota Batu memiliki tingkat penetrasi perbankan yang paling rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya di provinsi Jawa timur. Tercatat jumlah kepemilikan rekening deposit kota Batu pada tahun 2016 sebesar 374. Hal ini dikarenakan salah satunya yaitu kondisi geografis kota Batu yang berbeda dengan kondisi kota lainnya di provinsi Jawa Timur. Kota Batu memiliki kecenderungan berada di area pegunungan yang memungkinkan perbankan sulit untuk memasarkan produk-produknya. Masih banyak masyarakat kota Batu yang tinggal di pemukiman-pemukiman kecil

sehingga perbankan belum mampu secara luas untuk memasrkan produk-produknya.

Pada tabel 4.1 dapat diketahui pula bahwa wilayah kabupaten rata-rata memiliki penetrasi perbankan yang rendah yang dapat disebabkan oleh kondisi wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang kecil atau juga dapat disebabkan oleh kondisi geografis di wilayah kabupaten yang tidak memungkinkan untuk dijangkau oeh perbankan. Penetrasi perbankan terendah di wilayah kabupaten yaitu kabupaten Mojokerto yang memiliki tingkat penetrasi perbankan sebesar 353 pada tahun 2016. Sedangkan wilayah kabupaten yang memiliki penetrasi tertinggi yaitu kabupaten Sidoarjo dengan tingkat penetrasi perbankan tahun 2016 sebesar 849 (artinya dari 1.000 penduduk kabupaten Sidoarjo terdapat 849 penduduk yang memiliki rekening deposit di perbankan).

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa wilayah perkotaan memiliki penetrasi perbankan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten di Jawa Timur (kecuali kota Batu). Hal ini dikarenakan wilayah perkotaan lebih mudah untuk dijangkau oleh perbankan sehingga perbankan lebih luas dalam memasarkan produk-produknya. Disamping itu pengetahuan masyarakat perkotaan tentang perbankan lebih tinggi dikarenakan akses informasi yang lebih banyak diperoleh.

4.2.2 Indikator Aksesibilitas Jasa Keuangan (Perbankan)

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur inklusi keuangan yaitu dengan mengetahui tingkat aksesibilitas jasa keuangan (perbankan). Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah kantor bank baik kantor bank pusat, kantor cabang, maupun kantor cabang pembantu per 100.000 populasi dewasa yang ada pada masing-masing wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian. Tersedianya kantor perbankan yang

dapat dijangkau oleh masyarakat menunjukkan penyebaran jasa perbankan. Semakin banyak dan semakin luas penyebaran kantor cabang perbankan, maka layanan jasa perbankan yang diberikan semakin tinggi.

Tabel 4.2 Jumlah Kantor Bank Per 100.000 Populasi Dewasa

No	Kota/Kabupaten	Jumlah kantor Bank Per 100.000 Populasi Dewasa		
		2014	2015	2016
1	Kota Batu	9	9	10
2	Kota Surabaya	45	49	53
3	Kota Mojokerto	28	29	31
4	Kota Malang	18	20	22
5	Kota Pasuruan	11	12	13
6	Kota Probolinggo	13	14	16
7	Kota Blitar	15	15	17
8	Kota Kediri	17	18	20
9	Kota Madiun	24	26	27
10	Kab Gresik	6	7	9
11	Kab Sidoarjo	2	2	3
12	Kab Mojokerto	2	2	2
13	Kab Jombang	3	3	4
14	Kab Sumenep	1	1	1
15	Kab Bangkalan	1	1	1
16	Kab Banyuwangi	5	5	7
17	Kab Jember	4	4	5
18	Kab Malang	4	5	5
19	Kab Pasuruan	2	3	3
20	Kab Lumajang	2	2	2
21	Kab Kediri	2	2	3
22	Kab Nganjuk	6	7	8
23	Kab Tulungagung	6	7	7
24	Kab Blitar	2	2	3
25	Kab Madiun	3	3	3
26	Kab Ngawi	4	4	5
27	Kab Magetan	4	4	5
28	Kab Ponorogo	3	4	4
29	Kab Bojonegoro	5	6	7
30	Kab Tuban	2	2	3
31	Kab Lamongan	3	3	3

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah, 2018

Pada tabel 4.2 dapat diketahui jumlah kantor bank per 100.000 populasi dewasa di wilayah kota dan kabupaten provinsi Jawa Timur. Jumlah kantor

bank baik kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor cabang pembantu cenderung stabil, tidak mengalami peningkatan/penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pembangunan berupa sarana fisik perbankan cenderung sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Disamping itu, izin untuk mendirikan kantor bank juga relatif sulit serta pemilihan lokasi pembangunan juga menjadi kendala dikarenakan semakin menyempitnya lahan di masing-masing wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur.

Sama hal nya dengan indikator penetrasi perbankan, wilayah perkotaan memiliki tingkat aksesibilitas jasa keuangan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Kota Surabaya memiliki jumlah kantor bank (kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu) yang paling banyak di provinsi Jawa Timur yaitu tercatat sebanyak 53 kantor bank pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur dan kedua terbesar di Indonesia. Kondisi geografis di kota Surabaya juga mendukung untuk pendirian kantor bank. Disamping itu, permintaan terhadap layanan jasa perbankan juga tinggi karena kota Surabaya memiliki aktivitas perekonomian yang tinggi juga.

Sedangkan wilayah dengan tingkat aksesibilitas jasa keuangan yang paling kecil yaitu kabupaten Bangkalan dan kabupaten Sumenep yang masing-masiing memiliki 1 kantor bank pada tahun 2016. Kedua kabupaten tersebut masuk dalam wilayah Madura dimana wilayah tersebut merupakan daerah yang perkembangannya tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur. Meskipun Madura dengan kota Surabaya berdekatan yang disatukan dengan jembatan Suramadu namun kedua wilayah tersebut memiliki aksesibilitas jasa perbankan yang sangat berbeda. Wilayah Madura masih sulit berkembang. Pola pikir masyarakat sulit untuk menerima perubahan. Faktanya, banyak para investor yang menarik diri untuk

menanamkan modalnya di wilayah Madura. Pakar ekonomi Universitas Airlangga, Wasiaturrahma mengatakan bahwa pola pikir masyarakat Madura masih tergolong kurang modern. Masyarakat Madura kebanyakan mendatangkan barang dan kebutuhannya dari Surabaya dan daerah lainnya yang mengakibatkan ketergantungan. Disamping itu juga, masyarakat Madura sangat patuh dan tunduk terhadap tokoh agama meskipun yang disampaikan belum tentu benar.

Perbedaan yang signifikan antara wilayah kota dan kabupaten dalam aksesibilitas jasa keuangan dapat disebabkan oleh faktor geografis maupun demografis masing-masing wilayah. Wilayah perkotaan pada umumnya memiliki kondisi geografis yang lebih mudah untuk dijangkau oleh perbankan. Disamping itu, faktor demografis juga menjadi penentu bagi peningkatan aksesibilitas jasa keuangan. Wilayah perkotaan cenderung padat penduduk dengan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Tingginya aktifitas ekonomi di wilayah perkotaan tidak lepas dengan peran perbankan. Hal ini dikarenakan perbankan memiliki peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Sehingga tidak jarang ditemukan kantor bank baik kantor pusat, kantor cabang, atau kantor cabang pembantu di wilayah perkotaan.

Berbeda dengan kondisi wilayah perkotaan, sebagian besar wilayah kabupaten lebih luas dan jumlah penduduk yang banyak pula. Disamping itu, wilayah kabupaten cenderung berada di wilayah perbukitan atau pegunungan yang memungkinkan sulitnya untuk membangun sarana fisik berupa kantor bank. Luasnya wilayah kabupaten dan besarnya jumlah penduduk tidak sebanding dengan kantor bank yang ada di wilayah tersebut sehingga bank sulit untuk mengakses masyarakat dan memperkanalkan produknya lebih luas. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat di wilayah kabupaten yang tergolong *unbanked people.*

4.2.3 Indikator Usage (penggunaan) Rekening

Kegunaan dari jasa perbankan merupakan dimensi ketiga dari inklusi keuangan. Banyak orang yang memiliki akses terhadap jasa perbankan tetapi tidak menggunakan jasa tersebut dikarenakan berbagai alasan seperti jarak yang cukup jauh untuk menjangkau bank terdekat, produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan, atau memiliki pengalaman yang buruk dengan penyedia jasa. Memiliki rekening di bank tidaklah cukup untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif. Keberadaan jasa keuangan pun harus memiliki cukup manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dapat dalam berbagai bentuk seperti kredit, deposito, pembayaran, remitansi, transfer, dan lain-lain. Oleh karena itu, penggunaan harus dimasukkan ke dalam pengukuran sistem keuangan yanginklusif.

Menurut IMF dalam Bintan (2013:17) dikatakan bahwa indikator *usage* (penggunaan) diproksikan oleh beberapa item yaitu proporsi jumlah dana pihak ketiga (simpanan) dan pinjaman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Namun dikarenakan objek dalam penelitian ini adalah regional, maka skala proporsi jumlah dana pihak ketiga (simpanan) dan pinjaman menjadi terbatas pada wilayah atau regional sehingga simpanan dan pinjaman dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 4.3 Jumlah DPK dan Kredit terhadap PDRB (%)

No	Kota/Kabupaten	Jumlah DPK terhadap PDRB(%)			Jumlah Pinjaman terhadap PDRB (%)		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Kota Batu	15	18	20	14	17	19
2	Kota Surabaya	63	67	74	43	59	65
3	Kota Mojokerto	98	103	110	56	62	73
4	Kota Malang	41	49	57	28	37	45
5	Kota Pasuruan	52	57	66	58	69	81
6	Kota Probolinggo	24	38	47	31	45	58
7	Kota Blitar	63	73	85	37	48	59
8	Kota Kediri	10	15	22	12	27	38

No	Kota/Kabupaten	Jumlah DPK terhadap PDRB(%)			Jumlah Pinjaman terhadap PDRB (%)		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
9	Kota Madiun	52	65	74	40	56	72
10	Kab Gresik	19	27	39	67	79	92
11	Kab Sidoarjo	16	25	38	37	47	59
12	Kab Mojokerto	7	18	27	27	38	51
13	Kab Jombang	19	29	43	23	36	48
14	Kab Sumenep	9	21	42	12	26	44
15	Kab Bangkalan	24	35	49	20	33	46
16	Kab Banyuwangi	14	25	38	20	34	48
17	Kab Jember	20	31	46	23	36	48
18	Kab Malang	20	33	48	24	36	49
19	Kab Pasuruan	13	25	38	41	54	67
20	Kab Lumajang	13	25	38	14	26	39
21	Kab Kediri	27	41	59	46	58	69
22	Kab Nganjuk	17	28	43	19	32	45
23	Kab Tulungagung	19	30	42	17	28	37
24	Kab Blitar	18	27	39	19	29	45
25	Kab Madiun	19	28	40	23	36	49
26	Kab Ngawi	19	31	47	26	39	48
27	Kab Magetan	17	29	36	24	37	48
28	Kab Ponorogo	32	42	56	28	41	52
29	Kab Bojonegoro	9	22	38	14	27	41
30	Kab Tuban	11	25	38	16	28	42
31	Kab Lamongan	19	31	45	22	34	46

Sumber:Otoritas Jasa Keuangan diolah, 2018 dan BPS Kota/Kabupaten diolah, 2018

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah DPK dan kredit terhadap PDRB cenderung meningkat dari tahun ke tahun pada masing-masing kota dan kabupaten di provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan total dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat sekitarnya serta kredit yang disalurkan mengalami peningkatan yang berkontribusi terhadap PDRB masing-masing kota dan kabupaten yang bersangkutan.

Perbankan di Jawa Timur lebih banyak yang memiliki jumlah kredit daripada jumlah dana yang dihimpun (DPK). Hal ini dapat diketahui bahwa hanya beberapa kota dan kabupaten yang memiliki proporsi jumlah DPK yang

lebih besar dibanding proporsi kredit. Adapun daerah tersebut yaitu kabupaten Ponorogo, kabupaten Bangkalan, kota Madiun, kota Blitar, kota Malang, kota Surabaya, dan kota Batu.

Wilayah yang memiliki proporsi tertinggi jumlah DPK terhadap PDRB adalah kota Mojokerto yaitu sebesar 110% dan yang terendah adalah kota Batu yaitu sebesar 20%. Wilayah yang memiliki proporsi tertinggi jumlah kredit terhadap PDRB adalah kabupaten Gresik dan yang terendah adalah kota Batu. Selanjutnya, wilayah dengan selisih tertinggi antara proporsi jumlah DPK lebih besar dari jumlah kredit adalah kota Mojokerto dan selisih terkecil yaitu kota Batu. Sedangkan, wilayah yang memiliki proporsi tertinggi jumlah kredit lebih besar dari jumlah DPK adalah kabupaten Gresik dan selisih terkecil yaitu kabupaten Lamongan, kabupaten Lumajang, kabupaten Ngawi dan kabupaten Malang.

Selisih tertinggi antara proporsi jumlah DPK lebih besar daripada jumlah kredit yang terjadi di kota Mojokerto salah satunya dikarenakan wilayahnya yang luas serta tidak banyak industri yang berdiri di daerah tersebut sehingga kemungkinan perbankan lebih banyak aktifitas menghimpun dana daripada menyalurkan dana. Sebaliknya, selisih tertinggi antara proporsi jumlah kredit lebih besar daripada jumlah DPK seperti yang terjadi di kabupaten Gresik salah satunya dikarenakan didaerah tersebut terdapat industri dengan skala besar sehingga berkontribusi cukup besar terhadap PDRB.

Semakin tinggi selisih antara DPK terhadap kredit maka akan terjadi ketidakefisienan dalam menjalankan tugas perbankan untuk memperoleh keuntungan. Apabila selisih DPK dan kredit tinggi dimana jumlah DPK lebih besar dibanding kredit maka terdapat banyak dana-dana yang mengendap di bank sehingga bank semakin besar membayar biaya bunga dan keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Sebaliknya, apabila selisih antara DPK dan

kredit tinggi dengan jumlah kredit lebih besar dibanding jumlah DPK maka akan mengganggu likuiditas bank tersebut dikarenakan kurangnya sumber dana bank sedangkan dana yang disalurkan cukup tinggi. Untuk itu perbankan harus dapat mengelola DPK dan kredit dengan porsi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan yang efisien dan berkontribusi tinggi terhadap PDRB.

4.2.4 Hasil Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data informasi jumlah rekening deposit per 1.000 populasi dewasa, jumlah kantor bank per 100.000 populasi dewasa, serta jumlah DPK dan kredit terhadap PDRB (%) maka dapat dihitung indeks dari masing-masing indikator tersebut yang nantinya digunakan untuk menghitung indeks inklusi keuangan. Sebelum diketahui hasil dari indeks masing-masing indikator dan inklusi keuangan, perlu terlebih dahulu menentukan batas maksimum dan batas minimum dari masing-masing indikator. Berikut ini data batas maksimum dan minimum:

Tabel 4.4 Sebaran Setiap Indikator

Indikator	Jumlah Observasi	Maksimum			Minimum		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
Penetrasi Perbankan	31	3620	3623	3625	330	344	353
Aksesibilitas Perbankan	31	45	49	53	1	1	1
Penggunaan	31	154%	165%	183%	21%	35%	39%

Sumber: Data sekunder diolah,2018

Tabel 4.4 merupakan data maksimum dan data minimum dari setiap masing-masing indikator. Data maksimum diperoleh dari nilai data tertinggi masing-masing indikator per tahun, sedangkan data minimum diperoleh dari nilai data terendah masing-masing indikator per tahun.

Selanjutnya memberikan bobot dari masing-masing indikator dimana bobot masing-masing indikator adalah sama yaitu sebesar 1. Untuk batas minimum sesuai dengan penelitian Sarma (2012:17) adalah angka 0 dan batas maksimum merupakan nilai maksimum data sebaran pada masing-masing indikator. Dari penentuan batas maksimum, batas minimum, serta pemberian bobot maka diperoleh nilai masing-masing indeks penetrasi perbankan, aksesibilitas perbankan, serta penggunaan jasa keuangan seperti terlihat pada lampiran 1. Nilai indeks masing-masing indikator memiliki tren yang cenderung meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Hal ini dikarenakan nilai masing-masing indikator mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Setelah diperoleh nilai indeks masing-masing indikator maka dapat diketahui nilai indeks inklusi keuangan kabupaten dan kota. Tabel 4.5 menunjukkan nilai indeks inklusi keuangan kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur periode 2014-2016.

Tabel 4.5 Nilai Indeks Inklusi Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2016

NO	Kota / Kabupaten	Indeks Inklusi Keuangan			Rata-Rata
		2014	2015	2016	
1	Kota Batu	0.1648	0.1678	0.1709	**0.1678**
2	Kota Surabaya	0.7731	0.7990	0.7980	**0.7901**
3	Kota Mojokerto	0.8363	0.8241	0.8214	**0.8273**
4	Kota Malang	0.4593	0.4863	0.5008	**0.4822**
5	Kota Pasuruan	0.4374	0.4535	0.4662	**0.4524**
6	Kota Probolinggo	0.3049	0.3555	0.3854	**0.3486**
7	Kota Blitar	0.5299	0.5478	0.5694	**0.5490**
8	Kota Kediri	0.3382	0.3679	0.3948	**0.3670**
9	Kota Madiun	0.6330	0.6764	0.6884	**0.6659**
10	Kab Gresik	0.3174	0.3515	0.3847	**0.3512**
11	Kab Sidoarjo	0.2184	0.2530	0.2920	**0.2545**
12	Kab Mojokerto	0.1280	0.1766	0.2114	**0.1720**
13	Kab Jombang	0.1806	0.2270	0.2707	**0.2261**
14	Kab Sumenep	0.0920	0.1519	0.2259	**0.1566**
15	Kab Bangkalan	0.1814	0.2295	0.2701	**0.2270**

NO	Kota / Kabupaten	Indeks Inklusi Keuangan			Rata-Rata
		2014	2015	2016	
16	Kab Banyuwangi	0.1760	0.2254	0.2765	**0.2259**
17	Kab Jember	0.1859	0.2337	0.2785	**0.2327**
18	Kab Malang	0.1897	0.2445	0.2857	**0.2400**
19	Kab Pasuruan	0.1869	0.2419	0.2774	**0.2354**
20	Kab Lumajang	0.1291	0.1807	0.2243	**0.1780**
21	Kab Kediri	0.2600	0.3068	0.3463	**0.3043**
22	Kab Nganjuk	0.1815	0.2339	0.2811	**0.2322**
23	Kab Tulungagung	0.1923	0.2389	0.2667	**0.2326**
24	Kab Blitar	0.1543	0.1931	0.2437	**0.1970**
25	Kab Madiun	0.1916	0.2342	0.2710	**0.2323**
26	Kab Ngawi	0.1957	0.2453	0.2849	**0.2420**
27	Kab Magetan	0.1943	0.2435	0.2700	**0.2359**
28	Kab Ponorogo	0.2374	0.2845	0.3155	**0.2791**
29	Kab Bojonegoro	0.1404	0.1987	0.2540	**0.1977**
30	Kab Tuban	0.1230	0.1805	0.2304	**0.1780**
31	Kab Lamongan	0.1830	0.2312	0.2701	**0.2281**

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa indeks inklusi keuangan masing-masing kota dan kabupaten cenderung mengalami peningkatan mulai dari tahun 2014 hingga 2016, hanya terdapat dua kota yang tidak mengalami peningkatan yaitu kota Surabaya, dan kota Mojokerto. Peningkatan indeks inklusi keuangan masing-masing daerah disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah rekening deposit, jumlah kantor bank serta jumlah DPK dan kredit terhadap PDRB dari tahun ke tahun.

Nilai indeks inklusi keuangan tertinggi dari tahun ke tahun berada pada kota Mojokerto dimana rata-rata nilai indeks inklusi keuangannya tercatat sebesar 0.8273. Tingginya indeks inklusi keuangan di kota Mojokerto menunjukkan bahwa sektor perbankan di wilayah tersebut telah mampu memasarkan produk-produknya secara luas sehingga banyak masyarakat yang telah memakai/menggunakan layanan jasa keuangan perbankan. Hal ini dikarenakan kota Mojokerto merupakan kota yang memiliki luas wilayah yang paling kecil dengan jumlah penduduk yang kecil pula sehingga perbankan

lebih mudah untuk menjangkau masyarakat sekitarnya. Berbeda dengan kota Surabaya yang memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang begitu banyak namun memiliki nilai indeks inklusi keuangan tertinggi kedua setelah kota Mojokerto. Hal ini dikarenakan kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur serta merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan aktifitas ekonomi yang cukup tinggi sehingga sektor perbankan berperan penting dalam mendorong perekonomian masyarakat sekitarnya.

Sedangkan nilai indeks inklusi keuangan terendah pada tahun 2014 dan 2015 yaitu kabupaten Sumenep dengan nilai indeks inklusi keuangan secara berturut-turut sebesar 0.0920 dan 0.1519 sedangkan pada tahun 2016 kota Batu memiliki nilai indeks inklusi keuangan terendah dibanding daerah lainnya yaitu tercatat sebesar 0.1709. Rendahnya indeks inklusi keuangan disebabkan oleh rendahnya penetrasi, aksesibilitas, serta *usage* perbankan didaerah tersebut. Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang berada di wilayah Madura. Meskipun berdekatan deengan kota Surabaya namun terdapat perbedaan nilai indeks inklusi keuangan yang signifikan. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat nya yang cenderung tradisional dan sulit menerima perubahan, sistem birokrasi yang sulit, penguasaan monopolistis perusahaan besar menjadikan kompetisi kurang sehat, serta ketergantungan dengan wilayah atau daerah lainnya khususnya kota Surabaya. Dengan demikian sektor perbankan sulit untuk memasarkan produk-produknya kepada masyarakat sekitar sehingga penggunaan layanan jasa keuangan didaerah tersebut relatif rendah. Padahal kabupaten Sumenep memiliki letak geografis yang strategis dengan destinasi wisata, perikanan, peternakan, dan industri penggaraman yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya. Berbeda dengan kabupaten Sumenep, kota Batu memiliki indeks inklusi keuangan yang paling kecil dikarenakan letak geografis kota Batu yang

berada di wilayah perbukitan/pegunungan yang memungkinkan sulitnya membangun sarana fisik perbankan yang mengakibatkan perbankan belum mampu menjangkau masyarakat secara luas. Akibat keterbatasan tersebut, perbankan belum mampu memasarkan produknya dan banyak masyarakat yang belum mengakses dan menggunakan layanan jasa keuangan perbankan khususnya masyarakat yang berada didaerah terpencil.

Secara keseluruhan dilihat dari nilai rata-rata indeks inklusi keuangan dari tahun 2014-2016, wilayah perkotaan cenderung memiliki indeks inklusi keuangan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten di provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan wilayah perkotaan memiliki letak geografis yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh perbankan serta memiliki jumlah penduduk padat dengan aktifitas perekonomian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten, sehingga peran sektor perbankan sangat dibutuhkan dalam mendorong perekonomian masyarakat sekitarnya.

Dalam penelitian ini, indeks inklusi keuangan dapat dibagi kedalam tiga kategori berdasarkan nilai indeks inklusi keuangannya. Pertama, suatu wilayah kota/kabupaten dikategorikan sebagai provinsi dengan inklusi keuangan tinggi adalah wilayah yang memiliki indeks inklusi keuangan antara 0,6-1. Wilayah kota/kabupaten yang memiliki indeks inklusi keuangan antara 0,3-0,6 dikategorikan sebagai wilayah dengan inklusi keuangan sedang, dan wilayah kota/kabupaten yang memiliki indeks inklusi keuangan dibawah 0,3 dikategorikan sebagai wilayah dengan inklusi keuangan rendah.

Berikut ini klasifikasi wilayah kabupaten dan kota berdasarkan nilai indeks inklusi keuangannya:

Tabel 4.6 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Nilai Rata-Rata Indeks Inklusi Keuangan Periode 2014-2016

Kota/ Kabupaten	Penetrasi	Aksesi Bilitas	Usage	IIK	Batas	Klasifikasi Wilayah
Kota Mojokerto	0.9999	0.5997	0.9970	**0.8273**	0,6 – 1	Wilayah dengan Inklusi Keuangan Tinggi
Kota Surabaya	0.6884	0.9898	0.7372	**0.7901**		
Kota Madiun	0.7790	0.5245	0.7095	**0.6659**		
Kota Blitar	0.6131	0.3201	0.7232	**0.549**	0,3 - 0,6	Wilayah dengan Inklusi Keuangan Sedang
Kota Malang	0.5295	0.4078	0.5089	**0.4822**		
Kota Pasuruan	0.3384	0.2449	0.7604	**0.4524**		
Kota Kediri	0.4751	0.3742	0.2418	**0.367**		
Kab Gresik	0.2237	0.1487	0.6389	**0.3512**		
Kota Probolinggo	0.2669	0.2922	0.4780	**0.3486**		
Kab Kediri	0.2086	0.0473	0.5912	**0.3043**		
Kab Ponorogo	0.2214	0.0746	0.4943	**0.2791**	< 0,3	Wilayah dengan Inklusi Keuangan Rendah
Kab Sidoarjo	0.2321	0.0473	0.4369	**0.2545**		
Kab Ngawi	0.1886	0.0883	0.4119	**0.242**		
Kab Malang	0.1768	0.0951	0.4113	**0.24**		
Kab Magetan	0.2145	0.0883	0.3751	**0.2359**		
Kab Pasuruan	0.1163	0.0541	0.4677	**0.2354**		
Kab Jember	0.1729	0.0883	0.3996	**0.2327**		
Kab Tulungagung	0.2062	0.1361	0.3390	**0.2326**		
Kab Madiun	0.2152	0.0615	0.3823	**0.2323**		
Kab Nganjuk	0.1740	0.1424	0.3594	**0.2322**		
Kab Lamongan	0.1973	0.0615	0.3858	**0.2281**		
Kab Bangkalan	0.1996	0.0205	0.4057	**0.227**		
Kab Jombang	0.1828	0.0678	0.3880	**0.2261**		
Kab Banyuwangi	0.1905	0.1151	0.3494	**0.2259**		
Kab Bojonegoro	0.1612	0.1219	0.2927	**0.1977**		
Kab Blitar	0.1550	0.0473	0.3462	**0.197**		
Kab Lumajang	0.1537	0.0410	0.3017	**0.178**		
Kab Tuban	0.1363	0.0473	0.3112	**0.178**		
Kab Mojokerto	0.0945	0.0410	0.3288	**0.172**		
Kota Batu	0.1004	0.1908	0.2045	**0.1678**		
Kab Sumenep	0.1020	0.0205	0.2971	**0.1566**		

Sumber: Olahan Penulis, 2018

Pada tabel 4.6 dapat diketahui klasifikasi wilayah kota dan kabupaten yang memiliki nilai indeks inklusi keuangan tertinggi hingga terendah. Wilayah

kota rata-rata memiliki nilai indeks inklusi keuangan tinggi dan sedang. Hanya kota Batu yang masuk dalam indeks inklusi keuangan rendah yang dikarenakan letak geografis kota Batu yang berbeda dengan daerah lainnya (daerah perbukitan).

Wilayah yang memiliki indeks inklusi keuangan tinggi didominasi oleh wilayah perkotaan. Adapun wilayah tersebut yaitu kota Mojokerto, kota Surabaya, dan kota Madiun. Wilayah yang memiliki indeks inklusi keuangan sedang juga didominasi oleh wilayah perkotaan. Hanya terdapat dua wilayah kabupaten yang memiliki indeks inklusi keuangan sedang yaitu kabupaten Gresik dan Kediri. Sedangkan wilayah dengan indeks inklusi keuagan rendah didominasi oleh wilayah kabupaten. Hanya terdapat satu wilayah perkotaan yang memiliki indeks inklusi keuangan rendah yaitu kota Batu.

Pada tabel 4.6 juga diketahui bahwa wilayah dengan inklusi keuangan rendah memiliki nilai dimensi usage yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai dimensi penetrasi dan aksesibilitas. Ini menunjukkan bahwa pada wilayah inklusi keuangan rendah, kontribusi DPK dan Kredit terhadap PDRB memiliki nilai yang paling besar. Wilayah inklusi keuangan rendah rata-rata memiliki jumlah kantor bank yang sedikit dan jumlah rekening deposit yang kecil namun perbankan diwilayah tersebut memiliki kontribusi besar terhadap PDRB masing-masing wilayahnya.

Wilayah yang memiliki indeks inklusi keuangan tinggi dikarenakan nilai dari masing-masing dimensi (penetrasi, aksesibilitas, usage perbankan) juga tinggi. Artinya bahwa peran perbankan dalam mengakses masyarakat sekitarnya cukup tinggi. Sebaliknya wilayah yang memiliki indeks inklusi keuangan rendah dikarenakan nilai dari masing-masing dimensi (penetrasi, aksesibilitas, usage perbankan) juga rendah. Artinya bahwa peran perbankan dalam mengakses masyarakat sekitarnya masih tergolong rendah.

4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan

Terdapat banyak faktor pembangunan yang memengaruhi inklusi keuangan di suatu daerah, baik dari kondisi sosial ekonomi, infrastruktur fisik, maupun pembangunan di sektor perbankan. Dalam penelitian ini faktor pembangunan yang dianalisis hanya dilihat dari kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur di wilayah yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap inklusi keuangan, dalam penelitian ini dilakukan dengan uji regresi data panel.

4.3.1 Hasil Uji Regresi Data Panel

Regresi data panel dapat dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan yaitu uji pemilihan model, uji asumsi klasik, dan uji signifikansi.

a. Hasil Uji Spesifikasi Model

Regresi data panel memberikan alternatif model yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji statistik F atau Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode *commom effect* atau metode *fixed effect*. Kedua, Uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *fixed effect* atau metode *random effect*.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect.* Uji Chow dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (Prob.) untuk *cross-section* F. Jika nilainya lebih besar dari 0,05 (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi atau alpha) maka model yang terpilih adalah *common effect*. Tetapi jika lebih rendah dari 0,05 maka model yang terpilih adalah *fixed effect.* Adapun hasil uji Chow adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	246.467	(30,59)	0.0000

Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan hasil *output* uji Chow di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (Prob.) untuk *cross-section* F adalah 0,0000, lebih rendah dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Hausman

Dikarenakan hasil uji Chow memperlihatkan bahwa model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *common effect*, maka perlu dilakukan uji Hausman untuk mengetahui model terbaik antara model *fixed effect* dengan model *random effect*. Uji Hausman dilakukan dengan cara membandingkan nilai *probability cross section random* (p*value*) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 0,05 maka model yang terpilih adalah *random effect*, tetapi jika lebih kecil dari 0,05 maka model yang terpilih adalah *fixed effect*. Adapun hasil uji hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	22.378962	3	0.0001

Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan hasil *output* uji Hausman di atas dapat dilihat bahwa nilai probability *cross section random* (p *value*) adalah 0,0001, lebih rendah dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Ini menunjukkan bahwa model terbaik adalah *fixed effect*.

b. Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel

Berdasarkan pemilihan model yang terbaik yang telah dilakukan sebelumnya, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect,* yakni pendekatan model data panel yang hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Berikut ini adalah hasil estimasi data untuk model *fixed effect:*

Tabel 4.9 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	Standard Error	T-Statistic	T-Tabel	Probabilitas
Ln_PDRB Per Kap	0.098108	0.040716	2.40957	1.66216	0.0191
Ln_JPTS	0.24595	0.066398	3.704164	1.66216	0.0005
Ln_IPM	2.583177	0.228856	11.28733	1.66216	0.0000
Konstanta	-12.67752	0.63391	-19.9989	1.66216	0.0000
R^2		**0.996093**	**F-Statistic**		**455.8739**
Durbin-Watson Stat		**2.253681**	**Prob (F-stat)**		**0.000000**
Fixed Effect (Cross)					
_KabBangkalan	0.679129243	_KabTuban	0.366129	_KabMagetan	0.272129
_KabSumenep	0.580129243	_KabMadiun	0.365129	_KotaPasuruan	0.271129
_KabJember	0.565129243	_KabBlitar	0.350129	_KotaSurabaya	0.221129
_KotaMojokerto	0.555129243	_KabNganjuk	0.348129	_KotaBlitar	0.161129
_KabLumajang	0.549129243	_KabBanyuwa	0.329129	_KabGresik	0.151129
_KabPonorogo	0.477129243	_KabJombang	0.324129	_KabMojokerto	0.124129
_KabKediri	0.441129243	_KabLamongan	0.316129	_KotaBatu	0.000129
_KabMalang	0.414129243	_KotaProbolinggo	0.287129	_KotaKediri	-0.08487
_KabNgawi	0.401129243	_KotaMadiun	0.280129	_KabSidoarjo	-0.06087
_KabPasuruan	0.386129243	_KabTulungag	0.275129	_KotaMalang	-0.00587
_KabBojoneg	0.368129243				

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan hasil diatas maka persamaan model adalah sebagai berikut:

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \alpha_{1...31} + e_{it}$

Keterangan:

$\beta 0$ = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien masing-masing variabel

X_{1it} = PDRB per kapita

X_{2it} = persentase pengguna telepon seluler

X_{3it} = indeks pembangunan manusia

$\alpha_{1...31}$ = konstanta masing-masing di 31 kota/kabupaten di Jawa Timur

Nilai konstanta sebesar -12.67752 menunjukkan bahwa ketika nilai PDRB per kapita, persentase pengguna telepon seluler, dan indeks pembangunan manusia konstan/cateris paribus atau memiliki nilai sama dengan nol, maka indeks inklusi keuangan mengalami penurunan sebesar 12.67752. Terdapat 3 daerah yang mengalami penurunan indeks inklusi keuangan. Adapun ketiga daerah tersebut yaitu kota Kediri, kabupaten Sidoarjo dan kota Malang. Kota Kediri mengalami penurunan paling tinggi yaitu sebesar 0.08 jika dibandingkan dengan dua daerah lainnya. Sedangkan penurunan paling rendah yaitu kota Malang sebesar 0.005. Penurunan inklusi keuangan menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami ekslusifitas keuangan (kesulitan dalam mengakses jasa perbankan).

Sebaliknya nilai konstanta masing-masing kota dan kabupaten yang bernilai positif menunjukkan bahwa ketika nilai PDRB per kapita, persentase pengguna telepon seluler, dan indeks pembangunan manusia konstan/cateris paribus atau memiliki nilai sama dengan nol maka inklusi keuangan didaerah tersebut justru mengalami peningkatan atau disebut keuangan yang samakin inklusif. Adapun wilayah yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu kabupaten Bangkalan sebesar 0.6791, kabupaten Sumenep sebesar 0.5801, dan kabupaten Jember sebesar 0.5651. Hal ini

menunjukkan pada wilayah tersebut terjadi inklusivitas keuangan tertinggi (kemudahan dalam mengakses jasa perbankan).

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa daerah kabupaten rata-rata cenderung mengalami peningkatan tertinggi nilai inklusi keuangan pada saat nilai PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan persentase pengguna telepon seluler tidak dipertimbangkan atau memiliki nilai sama dengan nol. Hanya kabupaten Sidoarjo yang mengalami penurunan. Sebaliknya, wilayah perkotaan justru mengalami peningkatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Bahkan, terdapat dua kota yang mengalami penurunan inklusi keuangan yaitu kota Kediri dan kota Malang.

Berdasarkan data perkembangan inklusi keuangan kota dan kabupaten di Jawa Timur periode 2014 hingga 2016 diketahui bahwa nilai indeks inklusi keuangan tertinggi berada di wilayah perkotaan namun jika dilihat dari tahun ke tahun nilai peningkatan indeks inklusi keuangan tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan wilayah kabupaten yang memiliki nilai indeks inklusi keuangan terendah namun memiliki peningkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan wilayah perkotaan.

c. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan antar variabel independen dandependen. Pengujian tersebut dilakukan dalam tiga tahap yaitu uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.

1. Uji t-statistik

Uji t-statistik bertujuan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak.

Tabel 4.10 Hasil Uji t-statistik

Variabel	Koefisien	t-statistic	Prob	Keterangan
PDRB per Kapita	0.098	2.409	0.0191	Signifikan
Jumlah Pengguna Telepon Seluler	0.245	3.704	0.0005	Signifikan
IPM	2.583	11.287	0.0000	Signifikan

Sumber: Data Diolah, 2018

Hubungan satu sisi masing-masing variabel dinyatakan signifikan apabila nilai probabilitas kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5%. Apabila nilai probabilitas t < 5% maka variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel PDRB per Kapita sebesar 0.098 dengan probabilitas sebesar 0.0191 serta signifikan pada taraf nyata 5 persen. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap indeks inklusi keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita maka akan berdampak positif terhadap indeks inklusi keuangan suatu daerah.

Hasil uji t-statistik untuk variabel jumlah pengguna telepon seluler memiiki koefisien regresi positif sebesar 0.245 dengan probabilitas sebesar 0.0005 dan signifikan pada taraf 5 persen. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pengguna telepon seluler berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks inklusi keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak pengguna telepon seluler maka akan berdampak positif terhadap indeks inklusi keuangan suatu daerah.

Hasil uji t-statistik untuk variabel IPM memiliki koefisien regresi positif sebesar 2.583 yang signifikan pada taraf 5 persen dengan probabilitas sebesar 0.0000. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi IPM (Indeks

Pembangunan Manusia) maka akan berdampak positif terhadap indeks inklusi keuangan suatu daerah.

2. Uji F-statistik

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11 Hasil Uji F-statistik

F-statistic	Prob	Keterangan
129.5046	0.000000	Signifikan

Sumber: Data Diolah, 2018

Hasil dari pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB per kapita, jumlah pengguna telepon seluler, serta IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks inklusi keuangan. Hal ini dapat dilihat melalui nilai probabilitas yang dimiliki lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0.05 (5%).

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan himpunan variasi variabel dependen. Dari hasil estimasi model (tabel 4.9) dapat diketahui bahwa nilai *R squared* sebesar 0.986382. Hal ini menandakan bahwa model ini mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 98,63 persen, sedangkan sisanya sebesar 1.37 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

d. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki nilai residual yang telah distandarisasi dan terdistribusi normal. Apabila nilai residual terdistribusi normal, nilai yang diperoleh dari model regresi akan konsisten dan tidak bias. Uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik histogram

untuk melihat daerah penyebaran data. Pada pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas Jarque-Bera (J-B) dimana apabila probabilitas Jarque-Bera (J-B) lebih besar dari α(0.05) maka data berdistribusi normal. Berikut ini hasil uji normalitas:

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	Nilai	A
Probability	0.289764	0.05

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan tebel 4.12, nilai probabilitas Jarque-Bera (J-B) sebesar 0.289764 di atas 0,05 maka data telah terdistribusi normal.

2. Uji Mutikolinearitas

Multikolinearitas dapat terjadi dalam model regresi apabila terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel independen sehingga nilai parameter yang BLUE tidak dapat terpenuhi. Terjadinya multikolinearitas dapat menyebabkan nilai *standard error* dari koefisien menjadi tidak dipercaya sehingga hasil uji t tidak valid dan hasil estimasi menjadi tidak efisien. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai *centered* VIF lebih dari 10 maka terdapat multikolinearitas dalam model. Berikut ini hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
Ln_PDRB Per Kap	2.909259
Ln_JPTS	3.013456
Ln_IPM	1.528619

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.13 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Dimana seluruh nilai *centered* VIF berada kurang dari 10.

3. Uji Heterokedastisitas

Terjadinya permasalahan heteroskedastisitas akan menyebabkan hasil perkiraan OLS terhadap interval kepercayaan menjadi tidak dapat dipercaya

dan nilai statistik t menjadi tidak valid. Untuk mengetahui ada tidaknya permasalahan heterokedastisitas dapat dilihat dari perbandingan Prob (Chi-Square) dengan α (0.05). Jika Prob (Chi-Square) >α (0.05), maka tidak terjadi heterokedastisitas dalam model. Jika Prob (Chi-Square) <α (0.05), maka terjadi heterokedastisitas dalam model. Berikut ini hasil uji heterokedastisitas:

Tabel 4.14 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heterokeskedasticity Test	Nilai	A
Prob Chi-Square	0.0529	0.05

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.14, nilai Prob (Chi-Square) sebesar 0.0529 lebih besar daripada α=0.05. Dengan kata lain, model tidak terkena masalah heteroskedastisitas.

4.3.2 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Inklusi Keuangan

Setelah mengatahui hasil uji regresi data panel, maka akan dianalisis masing-masing pengaruh variabel PDRB per Kapita, jumlah pengguna telepon seluler, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

a. Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Indeks Inklusi Keuangan Jawa Timur

PDRB per kapita memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur dan signifikan pada taraf nyata 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika PDRB per kapita meningkat maka akan meningkatkan indeks inklusi keuangan suatu daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarma dan Pais (2011) yang mengatakan bahwa peningkatan PDRB per kapita akan meningkatkan inklusi keuangan.

Berdasarkan data dari BPS diperoleh bahwa PDRB per kapita masing-masing kota dan kabupaten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini juga mengakibatkan PDRB per kapita Jawa Timur selalu mengalami

pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan tingkat inklusi keuangan masing-masing kota dan kabupaten dari tahun 2014 sampai 2016 selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan PDRB per kapita, inklusi keuangan pada kota dan kabupaten di Jawa Timur juga meningkat.

Peningkatan PDRB merupakan salah satu cerminan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan kinerja perekonomian membaik. Kondisi perekonomian yang baik menjadi signal bagi perbankan untuk memperluas jaringannya sehingga akses perbankan semakin terbuka. Selain itu, peningkatan PDRB juga dapat mencerminkan peningkatan produktivitas masyarakat. Semakin produktif masyarakat dalam berbagai kegiatan perekonomian, maka semakin besar peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat, kesempatan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan semakin besar baik untuk menabung, melakukan investasi, ataupun untuk keperluan transaksi lainnya.

b. Pengaruh jumlah pengguna telepon seluler terhadap Indeks Inklusi Keuangan Jawa Timur

Jumlah pengguna telepon seluler memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur dan signifikan pada taraf nyata 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika jumlah pengguna telepon seluler meningkat maka akan meningkatkan indeks inklusi keuangan suatu daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarma dan Pais (2011) yang mengatakan bahwa peningkatan infrastruktur akan meningkatkan inklusi keuangan.

Saat ini teknologi komunikasi semakin maju salah satunya adalah telepon seluler. Telepon seluler tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja tetapi

telah dilengkapi fasilitas internet. Meskipun tidak semua pengguna telepon seluler mengakses dan menggunakan jasa perbankan, namun semakin banyaknya jumlah pengguna telepon seluler dapat meningkatkan akses perbankan. Hal ini karena perbankan pun telah mengembangkan fasilitas transaksi melalui sms banking atau mobile banking.

Gambar 4.1 Persentase Pengguna Telepon Seluler, SMS *Banking* dan Inklusi Keuangan Di Jawa Timur Periode 2012-2016

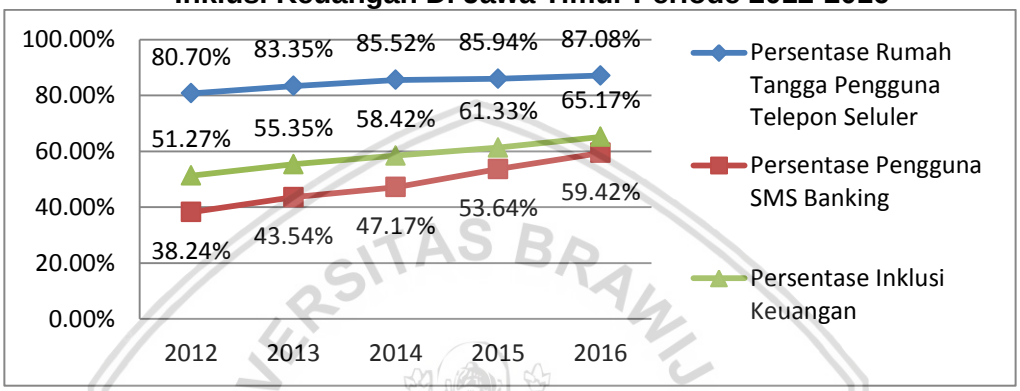

Sumber : BPS dan OJK, 2018

Berdasarkan gambar 4.1 diketahui bahwa persentase rumah tangga pengguna telepon seluler meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2012 persentase pengguna telepon seluler sebesar 80.70% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 87.08%. Peningkatan persentase pengguna telepon seluler juga diikuti oleh peningkatan persentase pengguna SMS *banking* di Jawa Timur. Pada tahun 2012 persentase pengguna SMS *banking* sebesar 38.24% dan tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 59.24%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengguna telepon seluler dapat mendorong peningkatan penggunaan *sms banking*. Rata-rata rumah tangga yang memiliki telepon seluler telah memiliki kepemilikan rekening di perbankan. Perbankan telah memfasilitasi nasabahnya agar lebih mudah untuk mengakses perbankan melalui *sms banking* ataupun *mobile banking*. Perkembangan teknologi dimanfaatkan perbankan untuk menjangkau masyarakat di berbagai

daerah. Hal ini akan mendorong peningkatan inklusi keuangan di masing-masing daerah Jawa Timur.

Perkembangan telepon seluler menunjukkan adanya kemajuan dalam teknologi. Telepon seluler juga dapat digunakan untuk mengakses internet. Penggunaan telepon seluler dapat memperluas informasi dan mengurangi hambatan jarak dan waktu. Telepon seluler dan internet dimanfaatkan perbankan untuk memperluas akses pelayanannya. Banyak perbankan yang sudah menggunakan internet dan telepon seluler sebagai media transaksi untuk mempermudah palayanan.

Perkembangan telepon seluler juga dapat memperbaiki arus informasi dan mengurangi biaya transaksi, terutama biaya dalam menjalankan perbankan dalam bentuk fisik (Oluwatayo, 2013). Adanya telepon seluler dapat meningkatkan akses perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat terjangkau oleh perbankan terutama di negara berkembang dimana jarak dan waktu merupakan biaya yang cukup besar (Mago dan Chitokwindo 2014). Salah satu contoh sukses dari layanan perbankan melalui telepon seluler bagi masyarakat miskin adalah M-Pesa di Kenya. Layanan tersebut merupakan hasil dari kerjasama operator seluler dan perbankan di Kenya. Cakupan dari layanan tersebut diantaranya *micro-saving* dan *micro-loan,* tanpa perlu memiliki rekening perbankan.

c. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Inklusi Keuangan Jawa Timur

Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan kabupaten dan kota di Jawa Timur. IPM merupakan indeks komposit dari variabel harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata bersekolah, dan sebagainya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sarma (2012) dan Ummah (2015) yang menunjukkan bahwa angka melek

huruf yang merupakan indikator pembentuk IPM memiliki pengaruh positif terhadap keuangan inklusif. Seluruh wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur memiliki tren IPM yang meningkat dari tahun ke tahun yang searah dengan tren positif indeks inklusi keuangan kota dan kabupaten di provinsi Jawa Timur tahun 2014-2016.

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah termasuk dalam kategori maju, berkembang, atau terbelakang dan juga menjadi parameter untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi suatu daerah terhadap kualitas rakyatnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bertujuan untuk mengukur pencapaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup yang layak (BPS). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Berdasarkan data dari BPS, indeks pembangunan manusia pada kabupaten dan kota di Jawa Timur terus meningkat dari tahun ke tahun. Indeks pembangunan manusia provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 tercatat 68.14 dan meningkat menjadi 69.74 pada tahun 2016. Meningkatnya indeks pembangunan juga telah meningkatkan inklusi keuangan pada kota dan kabupaten di Jawa Timur. Hal ini karena indeks pembangunan manusia menjadi tolak ukur dalam meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas sehingga masyarakat semakin banyak yang mengetahui ataupun mengakses layanan jasa keuangan formal.

Peningkatan IPM merupakan indikasi keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Kondisi perekonomian yang membaik menjadi signal bagi perbankan untuk memperluas jaringannya sehingga akses perbankan semakin terbuka. Peningkatan IPM juga mencerminkan peningkatan produktivitas masyarakat.

Semakin produktif masyarakat, maka semakin besar peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat, kebutuhan masyarakat menggunakan jasa perbankan semakin besar, baik untuk kegiatan menabung, investasi, ataupun keperluan transaksi lainnya.

Seiring dengan meningkatnya daya saing di berbagai daerah maka masyarakat dituntut untuk memiliki kapasitas yang kompetitif. Semakin tinggi kualitas pembangunan manusia, maka akan semakin berpeluang menghasilkan masyarakat yang berdaya saing untuk menggerakan perekonomian daerah dan perekonomian nasional.

4.4 Implikasi Penelitian

Secara keseluruhan, indeks inklusi keuangan kota dan kabupaten di provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mulai mengakses jasa keuangan formal yaitu perbankan. Meningkatnya inklusi keuangan berarti terjadi peningkatan sektor perbankan baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran kredit.

Inklusi keuangan yang meningkat akan berdampak positif pada berbagai aspek khususnya bagi perekonomian daerah maupun perekonmian nasional. Keuangan yang semakin inklusif dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah kebawah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Masyarakat menengah kebawah memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera dengan mengakses layanan keuangan. Inklusi keuangan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dana yang dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta dapat dijadikan sebagai modal untuk membuka usaha ataupun mengembangkan usaha-usaha kecil. Hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan

masyarakat sehingga kesenjangan pendapatan dapat berkurang. Dengan demikian, inklusi keuangan akan mempersempit kesenjangan sosial, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pencapaian stabilitas sistem keuangan.

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memiliki peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta pencapaian stabilitas system keuangan.

Pada dasarnya kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan untuk masyarakat menengah kebawah agar memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi.

Inklusi keuangan juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan. Literasi keuangan bertujuan agar masyarakat lebih bijak dalam mengelolah keuangannya, serta bijak dalam menginvestasikan keuangannya. Peningkatan literasi keuangan dapat dilakukan dengan mengenalkan produk-produk investasi dan keuangan yang jelas bisnis dan keuntungannya serta memiliki resiko yang terukur. Jika masyarakat telah terliterasi dengan baik serta inklusi keuangan berjalan secara optimal maka upaya dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan akan semakin mudah.

Saat ini, masing-masing daerah sedang gencar-gencarnya dalam meningkatkan inklusi keuangan tak terkecuali daerah-daerah yang ada di provinsi Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei OJK dimana Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat inklusi tertinggi di Indonesia bahkan

inklusi keuangan Jawa Timur lebih tinggi dari indeks inklusi keuangan nasional. Meskipun inklusi keuangan Jawa Timur tinggi namun masih terdapat masyarakat (khususnya menengah kebawah) yang belum mengakses jasa keuangan. Apalagi masyarakat yang berada diwilayah kabupaten dimana terdapat banyak hambatan dalam mengakses jasa perbankan. Untuk itu, agar dapat mencapai target inklusi keuangan 2019 yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 82 Tahun 2016 tentang strategi nasional keuangan inklusif sebesar 75 persen maka sektor perbankan masing-masing daerah lebih memperluas cakupannya sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk-produk perbankan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan, hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Indeks inklusi keuangan kota dan kabupaten di provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2016. Peningkatan indeks inklusi keuangan terjadi karena sektor perbankan pada masing-masing wilayah juga mengalami peningkatan yang dapat dinilai dari penetrasi perbankan, aksesibilitas jasa perbankan, serta usage (penggunaan) rekening. Disamping itu, terdapat perbedaan tingkat inklusi keuangan antara wilayah perkotataan dengan wilayah kabupaten. Dimana, wilayah perkotaan memiliki tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi jika dibandingkan wilayah kabupaten di provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan karena secara rata-rata wilayah perkotaan memiliki letak geografis yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh perbankan serta memiliki jumlah penduduk padat dengan aktivitas perekonomian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Sehingga peran sektor perbankan sangat dibutuhkan dalam mendorong perekonomian masyarakat sekitarnya.
2. Tingkat inklusi keuangan pada kota dan kabupaten di provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan kondisi infrastruktur. PDRB per kapita, indeks pembangunan yang merupakan bagian dari sosial ekonomi serta jumlah pengguna telepon seluler yang merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh yang positif terhadap indeks inklusi keuangan kota dan kabupaten di provinsi Jawa Timur. Semakin tinggi

indeks pembangunan suatu daerah serta semakin banyak jumlah pengguna telepon seluler maka akan meningkatkan inklusi keuangan daerah tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Jawa Timur

   Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan pentingnya kondisi akses jasa keuangan secara inklusif. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membuat kebijakan untuk memperluas akses layanan jasa keuangan perbankan hingga ke pelosok daerah. Pemerintah daerah dan OJK juga dapat memberikan target inklusi keuangan dari tahun ke tahun kepada masing-masing daerah agar sektor perbankan lebih fokus lagi dalam meningkatkan inklusi keuangan didaerah masing-masing.

2. Bagi Sektor Perbankan

   Sektor perbankan harus lebih meningkatkan kinerjanya agar masyarakat secara luas menggunakan layanan perbankan yaitu dengan meningkatkan setiap dimensi inklusi keuangan. Penetrasi perbankan dapat ditingkatkan dengan mengajak masyarakat untuk menabung. Akses perbankan dapat ditingkatkan dengan mengembangkan *branchless banking* seperti pengadaan ATM dan mesin setor tunai serta *mobile banking*. *Mobile banking* dapat menjadi intermediasi antara penyedia jasa keuangan dengan masyarakat kota/kabupaten di sekitarnya khususnya daerah yang tergolong *unbanked people*. Sedangkan untuk dimensi kegunaan, dapat menyediakan kredit murah dan mudah diakses oleh masyrakat/pengusaha kecil yang membutuhkan modal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam menghitung indeks inklusi keuangan sebaiknya jangkauan populasi lebih diperluas dan data-data yang dikumpulkan lebih lengkap, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya mampu mengembangkan rumus perhitungan indeks inklusi keuangan yang baru dengan mempertimbangkan banyak aspek tambahan, antara lain kantor fisik (pusat, cabang, cabang pembantu, kas, ATM) dan layanan virtual (*mobile banking* dan *internet banking*). Disamping itu, data pengguna jumlah telepon seluler lebih diperjelas agar benar-benar mampu menjelaskan pengguna telepon seluler yang bertujuan untuk mengakses jasa perbankan seperti data-data yang dimiliki perbankan itu sendiri (data pengguna sms *banking* atau *internet banking*). Selain itu, dalam penelitian ini juga variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap inklusi keuangan lebih berfokus pada variabel eksternal perbankan yang dikarenakan keterbatasan akses data internal perbankan. Untuk itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan agar menambahkan variabel-variabel yang berasal dari internal perbankan seperti rasio permodalan, likuiditas maupun profitabilitas bank, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sugiarto. 2014. *Strategi Nasional Literasi Keuangan*. Diambil dari materi seminar OJK. https://ikatanbankir.com/uploads/seminar/LKD-Final8may2014.pptx, diakses pada tanggal 23 Februari 2018

Allen F, Demirguc-Kunt A, Klapper L, Peria MSM. 2012. *The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts.* Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team. World Bank : Working paper No 6290

Andrianaivo, M., Kpodar, K. 2011. *ICT, Financial Inclusion, and Growth: Evidence from African Countries*. IMF Economic Review.

Andrianaivo M, Kpodar K. (2012). Mobile Phones, Financial Inclusion, and Growth.*Review of Economics and Institution. Vol.3 No.2*

Bank Dunia. 2014. *Penurunan Kemiskinan di Indonesia Melambat, Ketimpangan Meningkat: World Bank*. (Online). http://www.worldbank.org/ in/ news/ press- release/2014/09/23/ poverty- reduction- slows- inequality increases-world-bank-reports, diakses pada tanggal 5 Maret 2018

Bank Indonesia. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif Bank Indonesia*. Malang.t.th. indeks keuangan inklusif (Online). http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuangan/inklusif/indikator/indeks/konten s/default.aspx, diakses pada tanggal 25 Februari 2018

Bank Indonesia. (2014). *Booklet Financial Inclusion*. Jakarta: Bank Indonesia

Bintan Badriatul Ummah. 2013. *Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan dengan Pembangunan di ASIA. Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

Boediono. 1998. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2.BPFE : Yogyakarta.

Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE Yogyakarta.Yogyakarta.

BPS Kabupaten Bangkalan. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan. Tahun 2015*. Kabupaten Bangkalan

BPS Kabupaten Banyuwangi. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi. Tahun 2015*. Kabupaten Banyuwangi

BPS Kabupaten Bojonegoro. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015*. Kabupaten Bojonegoro

BPS Kabupaten Blitar. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Tahun 2015*. Kabupaten Blitar

BPS Kabupaten Jember. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Tahun 2015*. Kabupaten Jember

BPS Kabupaten Jombang. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jombang Tahun 2015*. Kabupaten Jombang

BPS Kabupaten Gresik. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik Tahun 2015* Kabupaten Gresik

BPS Kabupaten Kediri. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kediri Tahun 2015*. Kabupaten Kediri

BPS Kabupaten Lamongan. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamongan Tahun 2015*. Kabupaten Lamongan

BPS Kabupaten Lumajang. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Tahun 2015*. Kabupaten Lumajang

BPS Kabupaten Madiun. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Madiun Tahun 2015*. Kabupaten Madiun

BPS Kabupaten Magetan. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magetan Tahun 2015*. Kabupaten Magetan

BPS Kabupaten Malang. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Tahun 2015*. Kabupaten Malang

BPS Kabupaten Mojokerto. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mojokerto Tahun 2015*. Kabupaten Mojokerto

BPS Kabupaten Nganjuk. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk Tahun 2015*. Kabupaten Nganjuk

BPS Kabupaten Ngawi. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngawi Tahun 2015*. Kabupaten Ngawi

BPS Kabupaten Pasuruan. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pasuruan Tahun 2015*. Kabupaten Pasuruan

BPS Kabupaten Ponorogo. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*. Kabupaten Ponorogo

BPS Kabupaten Sidoarjo. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015*. Kabupaten Sidoarjo

BPS Kabupaten Sumenep. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumenep Tahun 2015*. Kabupaten Sumenep

BPS Kabupaten Tuban. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tuban Tahun 2015*. Kabupaten Tuban

BPS Kabupaten Tulungagung. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Tahun 2015*. Kabupaten Tulungagung

BPS Kota Batu. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Batu Tahun 2015*. Kota Batu

BPS Kota Blitar. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar Tahun 2015*. Kota Blitar

BPS Kota Kediri. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Kediri Tahun 2015*. Kota Kediri

BPS Kota Madiun. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun Tahun 2015*. Kota Madiun

BPS Kota Malang. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten MalangTahun 2015*. Kota Malang

BPS Kota Mojokerto. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Mojokerto Tahun 2015*. Kota Mojokerto

BPS Kota Pasuruan. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Pasuruan Tahun 2015*. Kota Pasuruan

BPS Kota Probolinggo. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Tahun 2015*. Kota Probolinggo

BPS Kota Surabaya. 2016. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Surabaya Tahun 2015*. Kota Surabaya

BPS Jawa Timur. 2016. Geografi dan Iklim, Topografi, Gunung, dan Sungai. (Online). http://jatim.bps.go.id/index.php?hal=subject&id=1 diakses pada tanggal 2 Mei 2018

Dewi Rachmad Kusuma. 2014. *Melek Keuangan Masyarakat Indonesia Masih di Bawah Singapura dan Malaysia*. (Online). http://finance.detik.com/read/2014/7/2002/112202/2625308/5/melek-keuangan-masyarakat-indonesia-masih-di--bawah-singapura-dan-malaysia, diakses pada tanggal 21 Februari 2018

Dittus, P and Michael, K. 2011. On *Harnessing the Potential of Financial Inclusion*. BIS Working Paper No:347. Switzerland: Bank for international Settlement.

European Commision Report. 2008. *Financial Services Provision And Preventionof Financial Exclusion*

Gerdeva A, Rhyne E. 2011. *Opportunities ond Obstacles to Financial Inclusion*.Center of Financial Inclusion at ACCION International No.12.

Global Financial Development Report.(2014). Financial Inclusion Data/ Global Findex. http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/indonesia diakses pada tanggal 23 Februari 2018

Kementerian Dalam Negeri. 2013. *Buku Induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan per Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia*. Jakarta

Leyshon A. and Thrift N. 1995.*Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States.* Transactions of the Institute of British Geographers

Macroeconomic Dashboard. 2017. *Perkembangan Ekonomi Terkini 2017*. (Online) http://macroeconomicdashboard.com/indeks.php.id/ekonomi-makro/166-perkembangan-ekonomi-terkini, diakses pada tanggal 23 Februari 2018

National Australian Bank Report. 2011. *Measuring Financial Exclusion inAustralia*.

Omwansa, T., Lule , I., &Waema, T. (2015). *The Influence of Trust and Risk in Behavioural Intention To Adopt Mobile Financial Services among the Poor*. *International Arab Journal of e-Technology*, 8-16.

Purba, Marlina Fransiska. (2016). *Analisis Keterkaitan Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Jawa Tengah 2010-2014*. Skripsi: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

Sanjaya I Made. 2014. *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia* [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Sarma Mandira. 2012. *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness*. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and development. Working Paper No.07/2012.

SarmaMandira, JesimPais. 2011. *Financial Inclusion and Development.* J Int Dev. 23:613-628.

SinggihSantosodanTjiptono. 2001. *RisetPemasaranKonsepdanAplikasidengan SPSS*, Elex Media Komputindo: Jakarta.

Sugiyono. 1999. *StatistikuntukPenelitianBisnis.* Bandung: Alfabeta

Todaro, M.P., dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Waverman, L., Meschi, M., & Fuss, M. (2005).*The impact of telecoms on economic growth in developing countries.*The Vodafone policy paper series, 2(03), 10-24.

Wibowo. 2014. *Mendekat ke Publik*. (Online) http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/12/21/334656/mendekat-ke-publik, diakses pada tanggal 23 Februari 2018

Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya, Ekonosia*, Jakarta.

Yusrina, Sabila. 2016. Keuangan Inklusif: Pilar Strategi ASEAN Economic Community. *Journal of Economic. Vol.14 No.2*

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 1: Indeks Dimensi Penetrasi Perbankan

NO	Kota / Kabupaten	Penetration		
		2014	2015	2016
1	Kota Batu	0.099	0.099	0.103
2	Kota Surabaya	0.688	0.688	0.689
3	Kota Mojokerto	1.000	1.000	1.000
4	Kota Malang	0.529	0.529	0.530
5	Kota Pasuruan	0.338	0.338	0.338
6	Kota Probolinggo	0.267	0.267	0.267
7	Kota Blitar	0.610	0.613	0.616
8	Kota Kediri	0.473	0.475	0.477
9	Kota Madiun	0.777	0.779	0.780
10	Kab Gresik	0.219	0.225	0.227
11	Kab Sidoarjo	0.230	0.232	0.234
12	Kab Mojokerto	0.091	0.095	0.097
13	Kab Jombang	0.180	0.183	0.186
14	Kab Sumenep	0.101	0.102	0.103
15	Kab Bangkalan	0.198	0.199	0.201
16	Kab Banyuwangi	0.189	0.190	0.192
17	Kab Jember	0.171	0.173	0.175
18	Kab Malang	0.175	0.176	0.179
19	Kab Pasuruan	0.114	0.116	0.118
20	Kab Lumajang	0.152	0.154	0.156
21	Kab Kediri	0.205	0.209	0.212
22	Kab Nganjuk	0.172	0.174	0.176
23	Kab Tulungagung	0.204	0.206	0.208
24	Kab Blitar	0.153	0.155	0.157
25	Kab Madiun	0.213	0.215	0.217
26	Kab Ngawi	0.186	0.189	0.191
27	Kab Magetan	0.212	0.214	0.218
28	Kab Ponorogo	0.219	0.222	0.224
29	Kab Bojonegoro	0.159	0.161	0.164
30	Kab Tuban	0.134	0.137	0.138
31	Kab Lamongan	0.195	0.197	0.200

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 1: Indeks Dimensi Aksesibilitas Jasa Perbankan

NO	Kota / Kabupaten	Availability		
		2014	2015	2016
1	Kota Batu	0.200	0.184	0.189
2	Kota Surabaya	0.989	0.990	0.991
3	Kota Mojokerto	0.622	0.592	0.585
4	Kota Malang	0.400	0.408	0.415
5	Kota Pasuruan	0.244	0.245	0.245
6	Kota Probolinggo	0.289	0.286	0.302
7	Kota Blitar	0.333	0.306	0.321
8	Kota Kediri	0.378	0.367	0.377
9	Kota Madiun	0.533	0.531	0.509
10	Kab Gresik	0.133	0.143	0.170
11	Kab Sidoarjo	0.044	0.041	0.057
12	Kab Mojokerto	0.044	0.041	0.038
13	Kab Jombang	0.067	0.061	0.075
14	Kab Sumenep	0.022	0.020	0.019
15	Kab Bangkalan	0.022	0.020	0.019
16	Kab Banyuwangi	0.111	0.102	0.132
17	Kab Jember	0.089	0.082	0.094
18	Kab Malang	0.089	0.102	0.094
19	Kab Pasuruan	0.044	0.061	0.057
20	Kab Lumajang	0.044	0.041	0.038
21	Kab Kediri	0.044	0.041	0.057
22	Kab Nganjuk	0.133	0.143	0.151
23	Kab Tulungagung	0.133	0.143	0.132
24	Kab Blitar	0.044	0.041	0.057
25	Kab Madiun	0.067	0.061	0.057
26	Kab Ngawi	0.089	0.082	0.094
27	Kab Magetan	0.089	0.082	0.094
28	Kab Ponorogo	0.067	0.082	0.075
29	Kab Bojonegoro	0.111	0.122	0.132
30	Kab Tuban	0.044	0.041	0.057
31	Kab Lamongan	0.067	0.061	0.057

Lampiran 1: Indeks Dimensi Usage (Penggunaan) Rekening

NO	Kota / Kabupaten	Usage		
		2014	2015	2016
1	Kota Batu	0.188	0.212	0.213
2	Kota Surabaya	0.688	0.764	0.760
3	Kota Mojokerto	0.997	0.997	0.997
4	Kota Malang	0.448	0.521	0.557
5	Kota Pasuruan	0.714	0.764	0.803
6	Kota Probolinggo	0.357	0.503	0.574
7	Kota Blitar	0.649	0.733	0.787
8	Kota Kediri	0.143	0.255	0.328
9	Kota Madiun	0.597	0.733	0.798
10	Kab Gresik	0.558	0.642	0.716
11	Kab Sidoarjo	0.344	0.436	0.530
12	Kab Mojokerto	0.221	0.339	0.426
13	Kab Jombang	0.273	0.394	0.497
14	Kab Sumenep	0.136	0.285	0.470
15	Kab Bangkalan	0.286	0.412	0.519
16	Kab Banyuwangi	0.221	0.358	0.470
17	Kab Jember	0.279	0.406	0.514
18	Kab Malang	0.286	0.418	0.530
19	Kab Pasuruan	0.351	0.479	0.574
20	Kab Lumajang	0.175	0.309	0.421
21	Kab Kediri	0.474	0.600	0.699
22	Kab Nganjuk	0.234	0.364	0.481
23	Kab Tulungagung	0.234	0.352	0.432
24	Kab Blitar	0.240	0.339	0.459
25	Kab Madiun	0.273	0.388	0.486
26	Kab Ngawi	0.292	0.424	0.519
27	Kab Magetan	0.266	0.400	0.459
28	Kab Ponorogo	0.390	0.503	0.590
29	Kab Bojonegoro	0.149	0.297	0.432
30	Kab Tuban	0.175	0.321	0.437
31	Kab Lamongan	0.266	0.394	0.497

Lampiran 2: Nilai X1 dan X2 untuk Menghitung Indeks Inklusi Keuangan

NO	Kota / Kabupaten	X1			X2		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Kota Batu	0.169	0.172	0.175	0.161	0.164	0.167
2	Kota Surabaya	0.801	0.824	0.823	0.745	0.774	0.773
3	Kota Mojokerto	0.891	0.884	0.882	0.782	0.764	0.760
4	Kota Malang	0.462	0.489	0.505	0.456	0.483	0.497
5	Kota Pasuruan	0.478	0.503	0.523	0.397	0.405	0.410
6	Kota Probolinggo	0.307	0.368	0.405	0.303	0.343	0.366
7	Kota Blitar	0.549	0.579	0.606	0.510	0.516	0.533
8	Kota Kediri	0.359	0.377	0.399	0.317	0.359	0.391
9	Kota Madiun	0.644	0.690	0.708	0.622	0.663	0.668
10	Kab Gresik	0.355	0.401	0.445	0.280	0.302	0.325
11	Kab Sidoarjo	0.240	0.286	0.336	0.197	0.220	0.248
12	Kab Mojokerto	0.140	0.205	0.253	0.116	0.148	0.169
13	Kab Jombang	0.192	0.253	0.310	0.169	0.201	0.232
14	Kab Sumenep	0.099	0.175	0.278	0.085	0.129	0.174
15	Kab Bangkalan	0.201	0.265	0.322	0.162	0.195	0.219
16	Kab Banyuwangi	0.180	0.241	0.303	0.172	0.210	0.250
17	Kab Jember	0.196	0.259	0.318	0.176	0.208	0.239
18	Kab Malang	0.200	0.269	0.328	0.179	0.220	0.244
19	Kab Pasuruan	0.214	0.287	0.340	0.159	0.197	0.215
20	Kab Lumajang	0.136	0.201	0.260	0.122	0.161	0.189
21	Kab Kediri	0.299	0.368	0.423	0.221	0.246	0.269
22	Kab Nganjuk	0.184	0.247	0.308	0.179	0.221	0.254
23	Kab Tulungagung	0.195	0.249	0.287	0.189	0.229	0.246
24	Kab Blitar	0.166	0.217	0.282	0.142	0.169	0.205
25	Kab Madiun	0.204	0.258	0.309	0.180	0.210	0.233
26	Kab Ngawi	0.207	0.272	0.324	0.185	0.218	0.246
27	Kab Magetan	0.203	0.266	0.298	0.186	0.221	0.242
28	Kab Ponorogo	0.261	0.321	0.367	0.214	0.248	0.264
29	Kab Bojonegoro	0.141	0.207	0.277	0.140	0.190	0.231
30	Kab Tuban	0.130	0.203	0.267	0.116	0.158	0.194
31	Kab Lamongan	0.194	0.257	0.311	0.172	0.206	0.229

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 3: Data Riil Indeks Inklusi Keuangan, PDRB, Persentasi Pengguna Telepon Seluler, IPM Tahun 2014-2016

No	Kota/Kabupaten	Tahun	IFI	PDRB	JPTS	IPM
1	Kota Batu	2014	0.165	43162.8	64.79	71.89
		2015	0.168	45615.7	67.8	72.62
		2016	0.171	48200.2	68.95	73.57
2	Kota Surabaya	2014	0.773	107959.9	90.04	78.87
		2015	0.799	113815.6	92.47	79.47
		2016	0.798	120057.5	93.27	80.38
3	Kota Mojokerto	2014	0.836	30269.8	76.44	75.04
		2015	0.824	31753.2	77.49	75.54
		2016	0.821	33398.3	78.45	76.38
4	Kota Malang	2014	0.459	46955.9	86.45	78.96
		2015	0.486	49280.1	88.3	80.05
		2016	0.501	51732.7	92.17	80.46
5	Kota Pasuruan	2014	0.437	23596.8	77.52	73.23
		2015	0.454	24709	76.38	73.78
		2016	0.466	25873.4	79.69	74.11
6	Kota Probolinggo	2014	0.305	27609.7	64.57	70.49
		2015	0.355	28946.5	66.69	71.01
		2016	0.385	30369.1	68.65	71.5
7	Kota Blitar	2014	0.530	26659.2	71.67	78.96
		2015	0.548	27968.9	74.79	80.05
		2016	0.569	29326.1	76.65	80.46
8	Kota Kediri	2014	0.338	248949.6	62.04	75.26
		2015	0.368	260519.7	67.37	76
		2016	0.395	272905.7	70.15	76.71
9	Kota Madiun	2014	0.633	45672.4	59.05	78.81
		2015	0.676	48316.8	62.64	79.48
		2016	0.688	50994.9	65.4	80.01
10	Kab Gresik	2014	0.317	61482	56.54	72.84
		2015	0.352	64762	58.38	73.57
		2016	0.385	67549.5	59.98	74.46
11	Kab Sidoarjo	2014	0.218	51074.6	57.05	76.78
		2015	0.253	52903.6	58.86	77.43
		2016	0.292	54954.3	60.8	78.17
12	Kab Mojokerto	2014	0.128	41375.1	53.09	70.22
		2015	0.177	43310.2	55.5	70.85
		2016	0.211	45245.3	56.94	71.38
13	Kab Jombang	2014	0.181	17653.5	49.66	69.07
		2015	0.227	18501.4	52.06	69.59
		2016	0.271	19401.2	53.4	70.03

No	Kota/Kabupaten	Tahun	IFI	PDRB	JPTS	IPM
14	Kab Sumenep	2014	0.092	20124.6	39.37	61.43
		2015	0.152	20287.8	41.66	62.38
		2016	0.226	20720.4	43.31	63.42
15	Kab Bangkalan	2014	0.181	18364.6	44.27	60.71
		2015	0.230	17716.5	45.67	61.49
		2016	0.270	17676.2	47.91	62.06
16	Kab Banyuwangi	2014	0.176	26450.3	53.99	67.31
		2015	0.225	27934.2	52.36	68.08
		2016	0.276	29331.5	54	69
17	Kab Jember	2014	0.186	17527.6	51.77	62.64
		2015	0.234	18371.7	55.42	63.04
		2016	0.279	19233.8	56.33	64.01
18	Kab Malang	2014	0.190	20794.8	55.27	65.59
		2015	0.245	21741.9	56.94	66.63
		2016	0.286	22746.6	57.94	67.51
19	Kab Pasuruan	2014	0.187	51038.8	53.8	64.35
		2015	0.242	53366.9	55.65	65.04
		2016	0.277	55851.9	57.2	65.71
20	Kab Lumajang	2014	0.129	17392.7	47.03	62.33
		2015	0.181	18129.4	48.22	63.02
		2016	0.224	18917.6	49.96	63.74
21	Kab Kediri	2014	0.260	14874.2	49.16	68.44
		2015	0.307	15519.9	50.04	68.91
		2016	0.346	16219.7	53.53	69.87
22	Kab Nganjuk	2014	0.181	13629.1	48.71	69.59
		2015	0.234	14279.9	49.5	69.9
		2016	0.281	14981.6	51.13	70.5
23	Kab Tulungagung	2014	0.192	20930.3	53.97	69.49
		2015	0.239	21863.1	55.84	70.07
		2016	0.267	22850.1	57.88	70.82
24	Kab Blitar	2014	0.154	17461.6	51.21	66.88
		2015	0.193	18269.1	53.49	68.13
		2016	0.244	19128	54.56	68.88
25	Kab Madiun	2014	0.192	15088.6	48.05	68.6
		2015	0.234	15833.3	50.64	69.39
		2016	0.271	16620.8	52.4	69.67
26	Kab Ngawi	2014	0.196	12902.8	52.89	67.78
		2015	0.245	13541.4	54.74	68.32
		2016	0.285	14234.6	57.19	68.96
27	Kab Magetan	2014	0.194	16424.6	50.57	70.29
		2015	0.243	17252	53.58	71.39
		2016	0.270	18149.9	55.78	71.94

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

No	Kota/Kabupaten	Tahun	IFI	PDRB	JPTS	IPM
28	Kab Ponorogo	2014	0.237	12825.8	47.02	67.4
		2015	0.284	13474.6	48.11	68.16
		2016	0.315	14164	49.74	68.93
29	Kab Bojonegoro	2014	0.140	32404.1	48.24	65.27
		2015	0.199	37920.8	49.3	66.17
		2016	0.254	46104	50.69	66.73
30	Kab Tuban	2014	0.123	30965	53.3	64.58
		2015	0.181	32315.1	54.39	65.52
		2016	0.230	33737.7	56.13	66.19
31	Kab Lamongan	2014	0.183	17774.4	48.92	69.42
		2015	0.231	18788.4	50.45	69.84
		2016	0.270	19882	54.66	70.34

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 3: Data Ln Indeks Inklusi Keuangan, PDRB, Persentasi Pengguna Telepon Seluler, IPM Tahun 2014-2016

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Ln_IFI	Ln_PDRB	Ln_JPTM	Ln_IPM
1	Kota Batu	2014	-1.803	10.673	4.171	4.275
		2015	-1.785	10.728	4.217	4.285
		2016	-1.767	10.783	4.233	4.298
2	Kota Surabaya	2014	-0.257	11.590	4.500	4.368
		2015	-0.224	11.642	4.527	4.375
		2016	-0.226	11.696	4.535	4.387
3	Kota Mojokerto	2014	-0.179	10.318	4.337	4.318
		2015	-0.193	10.366	4.350	4.325
		2016	-0.197	10.416	4.362	4.336
4	Kota Malang	2014	-0.778	10.757	4.460	4.369
		2015	-0.721	10.805	4.481	4.383
		2016	-0.692	10.854	4.524	4.388
5	Kota Pasuruan	2014	-0.827	10.069	4.351	4.294
		2015	-0.791	10.115	4.336	4.301
		2016	-0.763	10.161	4.378	4.306
6	Kota Probolinggo	2014	-1.188	10.226	4.168	4.255
		2015	-1.034	10.273	4.200	4.263
		2016	-0.953	10.321	4.229	4.270
7	Kota Blitar	2014	-0.635	10.191	4.272	4.369
		2015	-0.602	10.239	4.315	4.383
		2016	-0.563	10.286	4.339	4.388
8	Kota Kediri	2014	-1.084	12.425	4.128	4.321
		2015	-1.000	12.470	4.210	4.331
		2016	-0.929	12.517	4.251	4.340
9	Kota Madiun	2014	-0.457	10.729	4.078	4.367
		2015	-0.391	10.786	4.137	4.376
		2016	-0.373	10.839	4.181	4.382
10	Kab Gresik	2014	-1.148	11.026	4.035	4.288
		2015	-1.046	11.078	4.067	4.298
		2016	-0.955	11.121	4.094	4.310
11	Kab Sidoarjo	2014	-1.522	10.841	4.044	4.341
		2015	-1.374	10.876	4.075	4.349
		2016	-1.231	10.914	4.108	4.359
12	Kab Mojokerto	2014	-2.056	10.630	3.972	4.252
		2015	-1.734	10.676	4.016	4.261
		2016	-1.554	10.720	4.042	4.268
13	Kab Jombang	2014	-1.711	9.779	3.905	4.235
		2015	-1.483	9.826	3.952	4.243

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Ln_IFI	Ln_PDRB	Ln_JPTM	Ln_IPM
		2016	-1.307	9.873	3.978	4.249
14	Kab Sumenep	2014	-2.386	9.910	3.673	4.118
		2015	-1.885	9.918	3.730	4.133
		2016	-1.488	9.939	3.768	4.150
15	Kab Bangkalan	2014	-1.707	9.818	3.790	4.106
		2015	-1.472	9.782	3.821	4.119
		2016	-1.309	9.780	3.869	4.128
16	Kab Banyuwangi	2014	-1.737	10.183	3.989	4.209
		2015	-1.490	10.238	3.958	4.221
		2016	-1.286	10.286	3.989	4.234
17	Kab Jember	2014	-1.683	9.772	3.947	4.137
		2015	-1.454	9.819	4.015	4.144
		2016	-1.278	9.864	4.031	4.159
18	Kab Malang	2014	-1.662	9.942	4.012	4.183
		2015	-1.409	9.987	4.042	4.199
		2016	-1.253	10.032	4.059	4.212
19	Kab Pasuruan	2014	-1.677	10.840	3.985	4.164
		2015	-1.419	10.885	4.019	4.175
		2016	-1.282	10.930	4.047	4.185
20	Kab Lumajang	2014	-2.047	9.764	3.851	4.132
		2015	-1.711	9.805	3.876	4.143
		2016	-1.495	9.848	3.911	4.155
21	Kab Kediri	2014	-1.347	9.607	3.895	4.226
		2015	-1.182	9.650	3.913	4.233
		2016	-1.060	9.694	3.980	4.247
22	Kab Nganjuk	2014	-1.707	9.520	3.886	4.243
		2015	-1.453	9.567	3.902	4.247
		2016	-1.269	9.615	3.934	4.256
23	Kab Tulungagung	2014	-1.649	9.949	3.988	4.241
		2015	-1.432	9.993	4.022	4.249
		2016	-1.322	10.037	4.058	4.260
24	Kab Blitar	2014	-1.869	9.768	3.936	4.203
		2015	-1.645	9.813	3.979	4.221
		2016	-1.412	9.859	3.999	4.232
25	Kab Madiun	2014	-1.652	9.622	3.872	4.228
		2015	-1.451	9.670	3.925	4.240
		2016	-1.306	9.718	3.959	4.244
26	Kab Ngawi	2014	-1.631	9.465	3.968	4.216
		2015	-1.405	9.514	4.003	4.224
		2016	-1.256	9.563	4.046	4.234
27	Kab Magetan	2014	-1.638	9.707	3.923	4.253

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Ln_IFI	Ln_PDRB	Ln_JPTM	Ln_IPM
		2015	-1.413	9.756	3.981	4.268
		2016	-1.309	9.806	4.021	4.276
28	Kab Ponorogo	2014	-1.438	9.459	3.851	4.211
		2015	-1.257	9.509	3.873	4.222
		2016	-1.154	9.558	3.907	4.233
29	Kab Bojonegoro	2014	-1.963	10.386	3.876	4.179
		2015	-1.616	10.543	3.898	4.192
		2016	-1.370	10.739	3.926	4.201
30	Kab Tuban	2014	-2.096	10.341	3.976	4.168
		2015	-1.712	10.383	3.996	4.182
		2016	-1.468	10.426	4.028	4.193
31	Kab Lamongan	2014	-1.698	9.786	3.890	4.240
		2015	-1.465	9.841	3.921	4.246
		2016	-1.309	9.898	4.001	4.253

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 4: Uji Common Effect

Dependent Variable: IFI?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 07/10/18 Time: 09:07
Sample: 2014 2016
Included observations: 3
Cross-sections included: 31
Total pool (balanced) observations: 93
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_PDRB?	-0.002492	0.004909	-0.507686	0.6129
LN_JPTS?	0.799321	0.050976	15.68020	0.0000
LN_IPM?	-0.683745	0.041525	-16.46581	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.818199	Mean dependent var	0.882763
Adjusted R-squared	0.814159	S.D. dependent var	1.167159
S.E. of regression	0.125965	Sum squared resid	1.428057
Durbin-Watson stat	0.572925		

Unweighted Statistics

R-squared	0.493250	Mean dependent var	0.313151
Sum squared resid	1.475793	Durbin-Watson stat	0.048527

Lampiran 4: Uji Fixed Effect

Dependent Variable: IFI?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/10/18 Time: 09:08
Sample: 2014 2016
Included observations: 3
Cross-sections included: 31
Total pool (balanced) observations: 93

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.87458	1.334964	-8.895054	0.0000
LN_PDRB?	0.078970	0.063677	1.240163	0.2198
LN_JPTS?	0.265728	0.112562	2.360724	0.0216
LN_IPM?	2.421739	0.452219	5.355240	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_KOTABATU--C	-0.302099			
_KOTASURABAYA--C	-0.055251			
_KOTAMOJOKERTO--C	0.249848			
_KOTAMALANG--C	-0.296608			
_KOTAPASURUAN--C	-0.043397			
_KOTAPROBOLING--C	-0.027228			
_KOTABLITAR--C	-0.137116			
_KOTAKEDIRI--C	-0.346054			
_KOTAMADIUN--C	-0.004513			
_KABGRESIK--C	-0.139199			

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

_KABSIDOARJO--C	-0.346818
_KABMOJOKERTO--C	-0.179434
_KABJOMBANG--C	0.002835
_KABSUMENEP--C	0.247537
_KABBANGKALAN--C	0.339435
_KABBANYUWA--C	0.011727
_KABJEMBER--C	0.227791
_KABMALANG--C	0.086860
_KABPASURUAN--C	0.072944
_KABLUMAJANG--C	0.213309
_KABKEDIRI--C	0.115822
_KABNGANJUK--C	0.023599
_KABTULUNGAG--C	-0.043225
_KABBLITAR--C	0.024818
_KABMADIUN--C	0.040260
_KABNGAWI--C	0.069803
_KABMAGETAN--C	-0.046810
_KABPONOROGO--C	0.147539
_KABBOJONEG--C	0.053601
_KABTUBAN--C	0.044407
_KABLAMONGAN--C	-0.004386

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995240	Mean dependent var	0.313151
Adjusted R-squared	0.992577	S.D. dependent var	0.177919
S.E. of regression	0.015329	Akaike info criterion	-5.242021
Sum squared resid	0.013864	Schwarz criterion	-4.316124
Log likelihood	277.7540	Hannan-Quinn criter.	-4.868170
F-statistic	373.7815	Durbin-Watson stat	1.822253
Prob(F-statistic)	0.000000		

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 4: Uji Random Effect

Dependent Variable: IFI?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/10/18 Time: 09:08
Sample: 2014 2016
Included observations: 3
Cross-sections included: 31
Total pool (balanced) observations: 93
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.896270	0.970615	-9.165601	0.0000
LN_PDRB?	-0.003990	0.032184	-0.123973	0.9016
LN_JPTS?	0.467797	0.092355	5.065190	0.0000
LN_IPM?	1.729074	0.311875	5.544123	0.0000
Random Effects (Cross)				
_KOTABATU--C	-0.270088			
_KOTASURABAYA--C	0.050076			
_KOTAMOJOKERTO--C	0.247784			
_KOTAMALANG--C	-0.250044			
_KOTAPASURUAN--C	-0.083375			
_KOTAPROBOLING--C	-0.048852			
_KOTABLITAR--C	-0.102173			
_KOTAKEDIRI--C	-0.137200			
_KOTAMADIUN--C	0.106668			
_KABGRESIK--C	-0.042411			
_KABSIDOARJO--C	-0.232043			
_KABMOJOKERTO--C	-0.130627			
_KABJOMBANG--C	-0.018844			
_KABSUMENEP--C	0.201938			
_KABBANGKALAN--C	0.250935			
_KABBANYUWA--C	0.002552			
_KABJEMBER--C	0.127662			
_KABMALANG--C	0.028809			
_KABPASURUAN--C	0.077106			
_KABLUMAJANG--C	0.133693			
_KABKEDIRI--C	0.077292			
_KABNGANJUK--C	-0.007610			
_KABTULUNGAG--C	-0.061171			
_KABBLITAR--C	-0.019621			
_KABMADIUN--C	0.007335			
_KABNGAWI--C	-0.002357			
_KABMAGETAN--C	-0.063889			
_KABPONOROGO--C	0.098464			
_KABBOJONEG--C	0.065267			
_KABTUBAN--C	0.015157			
_KABLAMONGAN--C	-0.020435			

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.112448	0.9818
Idiosyncratic random	0.015329	0.0182

Weighted Statistics

R-squared	0.787007	Mean dependent var	0.024570

Adjusted R-squared	0.779828	S.D. dependent var	0.036050
S.E. of regression	0.016916	Sum squared resid	0.025467
F-statistic	109.6181	Durbin-Watson stat	1.166562
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.477131	Mean dependent var	0.313151
Sum squared resid	1.522735	Durbin-Watson stat	0.019510

Lampiran 4: Uji Fixed Effect (Modifikasi)

Dependent Variable: IFI?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 07/10/18 Time: 09:11
Sample: 2014 2016
Included observations: 3
Cross-sections included: 31
Total pool (balanced) observations: 93
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.67752	0.633910	-19.99892	0.0000
LN_PDRB?	0.098108	0.040716	2.409570	0.0191
LN_JPTS?	0.245950	0.066398	3.704164	0.0005
LN_IPM?	2.583177	0.228856	11.28733	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_KOTABATU--C	-0.313187			
_KOTASURABAYA--C	-0.092277			
_KOTAMOJOKERTO--C	0.241985			
_KOTAMALANG--C	-0.318787			
_KOTAPASURUAN--C	-0.042140			
_KOTAPROBOLING--C	-0.026006			
_KOTABLITAR--C	-0.152003			
_KOTAKEDIRI--C	-0.397914			
_KOTAMADIUN--C	-0.032536			
_KABGRESIK--C	-0.161774			
_KABSIDOARJO--C	-0.373633			
_KABMOJOKERTO--C	-0.189266			
_KABJOMBANG--C	0.010877			
_KABSUMENEP--C	0.266901			
_KABBANGKALAN--C	0.365889			
_KABBANYUWA--C	0.015985			
_KABJEMBER--C	0.252466			
_KABMALANG--C	0.100811			
_KABPASURUAN--C	0.073068			
_KABLUMAJANG--C	0.236424			
_KABKEDIRI--C	0.128047			
_KABNGANJUK--C	0.034825			
_KABTULUNGAG--C	-0.038080			
_KABBLITAR--C	0.037445			
_KABMADIUN--C	0.051574			
_KABNGAWI--C	0.087868			
_KABMAGETAN--C	-0.040608			
_KABPONOROGO--C	0.163592			

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

_KABBOJONEG--C	0.055124
_KABTUBAN--C	0.052773
_KABLAMONGAN--C	0.002559

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.996093	Mean dependent var	0.467784
Adjusted R-squared	0.993908	S.D. dependent var	0.288900
S.E. of regression	0.014772	Sum squared resid	0.012874
F-statistic	455.8739	Durbin-Watson stat	2.253681
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.995151	Mean dependent var	0.313151
Sum squared resid	0.014121	Durbin-Watson stat	1.822025

Lampiran 5: Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	246.467584	(30,59)	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: IFI?
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 07/10/18 Time: 09:12
Sample: 2014 2016
Included observations: 3
Cross-sections included: 31
Total pool (balanced) observations: 93
Use pre-specified GLS weights

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.167633	0.502165	-6.307955	0.0000
LN_PDRB?	-0.016930	0.017448	-0.970324	0.3345
LN_JPTS?	0.466033	0.079549	5.858449	0.0000
LN_IPM?	0.409372	0.155995	2.624265	0.0102

Weighted Statistics

R-squared	0.506515	Mean dependent var	0.467784
Adjusted R-squared	0.489881	S.D. dependent var	0.288900
S.E. of regression	0.135177	Sum squared resid	1.626291
F-statistic	30.44997	Durbin-Watson stat	0.125424

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.581911	Mean dependent var	0.313151
Sum squared resid	1.217587	Durbin-Watson stat	0.049447

Lampiran 5: Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.378962	3	0.0001

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LN_PDRB?	0.078970	-0.003990	0.003019	0.1311
LN_JPTS?	0.265728	0.467797	0.004141	0.0017
LN_IPM?	2.421739	1.729074	0.107236	0.0344

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: IFI?
Method: Panel Least Squares
Date: 07/10/18 Time: 09:13
Sample: 2014 2016
Included observations: 3
Cross-sections included: 31
Total pool (balanced) observations: 93

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.87458	1.334964	-8.895054	0.0000
LN_PDRB?	0.078970	0.063677	1.240163	0.2198
LN_JPTS?	0.265728	0.112562	2.360724	0.0216
LN_IPM?	2.421739	0.452219	5.355240	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995240	Mean dependent var	0.313151
Adjusted R-squared	0.992577	S.D. dependent var	0.177919
S.E. of regression	0.015329	Akaike info criterion	-5.242021
Sum squared resid	0.013864	Schwarz criterion	-4.316124
Log likelihood	277.7540	Hannan-Quinn criter.	-4.868170
F-statistic	373.7815	Durbin-Watson stat	1.822253
Prob(F-statistic)	0.000000		